

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG TIDAK ADA  
HAK WARIS ANAK PEREMPUAN**  
(Studi pada Masyarakat Lampung Pepadun di Desa Komering Putih  
Lampung Tengah)

**Skripsi**

Diajukan Sebagai Syarat Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Dalam Hukum Keluarga Islam

**Oleh**

**GIA NOVIANSAH**

**NPM: 1521010054**

**Jurusan: Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah**



**FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**RADEN INTAN LAMPUNG**

**TAHUN**

**1439 H/ 2019 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG TIDAK ADA  
HAK WARIS ANAK PEREMPUAN**  
(Studi pada Masyarakat Lampung Pepadun di Desa Komering Putih  
Lampung Tengah)

**Skripsi**

Diajukan Sebagai Syarat Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Dalam Hukum Keluarga Islam

**Oleh:**

**GIA NOVIANSAH**  
**NPM : 1521010054**  
**Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah**

**Pembimbing I : Dra. Firdaweri, M. H. I.**

**Pembimbing II : Khoiruddin, M. S. I.**

**FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**RADEN INTANLAMPUNG**

**TAHUN**

**1441 H/ 2019 M**

## ABSTRAK

Adat Lampung Pepadun adalah salah satu dari dua kelompok adat besar dalam masyarakat Lampung. Sistem kewarisan yang di pakai adalah berdasarkan geneologis, yaitu masyarakat patrilineal dimana pembagian warisannya jatuh kepada anak laki-laki yang tertua saja. Sedangkan anak laki-laki yang tidak tertua dan anak perempuan tidak mendapatkan warisan sama sekali baik sebelum dan sesudah menikah. Hukum Islam menjelaskan bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan. Oleh sebab itu, rumusan masalahnya adalah : 1. Bagaimana Praktik pembagian waris pada masyarakat Lampung pepadun di desa Komerling Putih Lampung Tengah. 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembagian waris anak perempuan yang tidak mendapatkan warisan pada masyarakat tersebut.

Penelitian ini bertujuan, untuk mengetahui sejauh mungkin faktor apa saja yang mempengaruhi wanita tidak mendapatkan waris pada masyarakat adat Lampung pepadun tersebut dan untuk mengetahui sejauh mungkin tinjauan hukum Islam mengenai anak perempuan yang tidak mendapatkan waris di desa tersebut. penelitian ini adalah Penelitian lapangan (*Field Research*) dalam hal ini data atau informasi bersumber dari Desa Komerling Putih Lampung Tengah. sumber data ada dua, yaitu data primer dan sekunder. Metode yang digunakan yaitu menggunakan metode berfikir induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit kemudian dari fakta itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum. Metode analisa datanya adalah kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini adalah bahwa praktik pembagian harta warisan di desa Komerling yang jatuh pada anak laki-laki tertua dikarenakan faktor-faktor sebagai berikut: 1. Sebagai penerus tanggung jawab orangtua karena mereka berkewajiban mengurus dan memelihara saudara-saudaranya yang lain. 2. Anak perempuan tersebut akan menjadi tanggung jawab suaminya apabila dia sudah menikah dan jika dia belum menikah dia menjadi tanggung jawab kakak laki-laki tertuanya. 3. Hal tersebut sudah menjadi kebiasaan secara turun-temurun dan tidak menimbulkan kemafsadatan di kalangan masyarakat tersebut. Secara hukum Islam meninjau bahwa pembagian harta waris adat Lampung Pepadun tersebut bertentangan dengan surah An-nissa' (4) ayat 7 dan ayat 11. Menurut hemat penulis Hukum Kewarisan Islam yang ada tidak bersifat memaksa umatnya, jika adat Lampung pepadun tersebut sudah menjadi kebiasaan secara turun temurun dan tidak mengakibatkan perselisihan diantara ahli waris dan membawa maslahat untuk keluarga maka diperbolehkan. Tetapi seharusnya para alim ulama yang mengerti masalah hukum kewarisan Islam hal ini harus lebih di sosialisasikan kepada masyarakat agar adat tersebut bisa berubah sesuai dengan hukum kewarisan Islam.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**  
**LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol Hi. Endro Suramin, Sukarame, Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 783260

**PERSETUJUAN**

Tim pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara:

Nama : **GIA NOVIANSAH**

NPM : **1521010054**

Fakultas : **Syari'ah**

Jurusan : **Ahwal Syakhshiyah**

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERTANG TIDAK ADA HAK WARIS ANAK PEREMPUAN (Studi pada Masyarakat Lampung Pepadun di Desa Komerang Putih Lampung Tengah)**

**DISETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
**Dra. Firdaweri, M. H. I**  
**NIP: 195509191982032004**

  
**Khoiruddin, M. S. I**  
**NIP: 197807252009121002**

**Mengetahui**

**Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah**

  
**H. Rohmat, S.Ag., M.H.I**  
**NIP: 197409202003121003**





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**  
**LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARI'AH**

**Alamat: Jl. Letkol Hi. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 783260**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul: **“TINJAUN HUKUM ISLAM TENTANG TIDAK ADA HAK WARIS ANAK PEREMPUAN (Studi Pada Masyarakat Lampung Pepadun Di Desa Komering Putih Lampung Tengah)”**, Disusun oleh: **GIA NOVIANSAH**, NPM: **1521010054**, Fakultas: **Syari'ah**, Jurusan: **Ahwal Syakhsiyyah** Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah pada hari/tanggal:

**TIM MUNAQOSYAH**

Ketua : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I

Sekretaris : Rudi Santoso, M.H.I

Penguji Utama : Dr. H. Khoirul Abror, M.H.

Penguji Pendamping I : Dra. Firdaweri, M.H.I

Penguji Pendamping II : Khoiruddin, M.S.I

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah



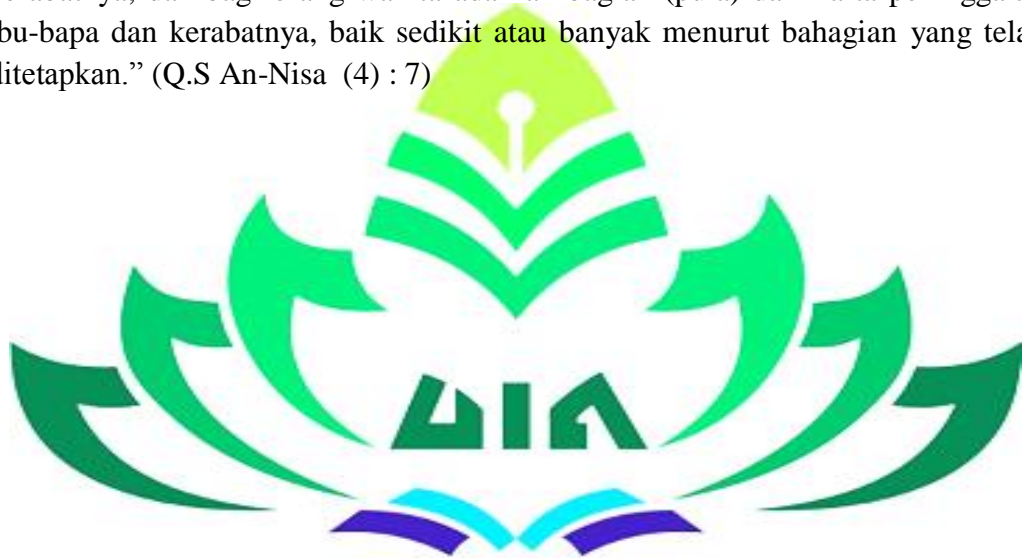
Khoiruddin, M.H.  
NIP. 196210221993031002



## MOTTO

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ  
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (النساء : 7)

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.” (Q.S An-Nisa (4) : 7)



## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Penuh cinta dan kasih-Nya Alhamdulillahirabbil'amin, dengan rasa syukur kepada Allah SWT, Kupersembahkan rasa terimakasihku atas semua bantuan dan do'a yang telah diberikan dengan terselesainya skripsi ini kepada:

1. Ayahandaku tercinta Hermansah dan Ibundaku tercinta Zubaidah, terimakasih yang tiada terhingga ku persembahkan karya kecil ini untuk ayah dan ibu yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga. Semoga ini menjadi langkah awal untuk dapat membahagiakan ayah dan ibu.
2. Kakak dan adik-adikku, tiada yang paling mengharukan saat berkumpul bersama kalian, terimakasih atas kasih sayang dan pengertian.
3. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## **RIWAYAT HIDUP**

Nama lengkap Gia Noviansah. Merupakan anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan Hermansah dan Zubaidah yang dilahirkan di Tangerang pada tanggal 28 November 1996.

Menempuh pendidikan pertama di TK Gunung Sugih Lampung Tengah pada tahun 2002 selesai pada tahun 2004, kemudian melanjutkan pendidikan ke Sekolah Dasar Negeri di SD Negeri 1 Gunung Sugih selesai pada tahun 2009, kemudian melanjutkan sekolah lanjut tingkat pertama di SMP Negeri 3 Terbanggi Besar selsai pada tahun 2012, sedangkan pendidikan sekolah lanjut tingkat atas ditempuh pada MAN 1 Lampung Tengah dan selsai pada tahun 2015, pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan di Fakultas Syari'ah pada Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Negeri Islam Raden Intan Lampung.



## KATA PENGANTAR

Teriring salam dan do'a semoga Allah SWT selalu melimpahkan taufiq dan hidayah -Nya dalam kehidupan ini. Tiada kata yang pantas diucapkan selain kalimat syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kelapangan berfikir, membukakan pintu hati, dengan ridho dan inayah-Nya dan diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Tidak Ada Hak Waris Anak Perempuan (Studi Pada Masyarakat Lampung Pepadun Di Desa Komerang Putih Lampung Tengah)”**.

Sholawat beriringan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan menuju alam berilmu pengetahuan seperti kita rasakan hingga saat ini. Penyusunan skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada program strata satu (S1) di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Dalam proses penulisan skripsi ini, tentu saja tidak merupakan hasil usaha sendiri, banyak sekali menerimamotivasi bantuan pemikiran, materil dan moril dan partisipasi dari berbagai pihak, oleh karena itu tak lupa dihanturkan terimakasih sedalam-dalamnya secara rinci ungkapan terimakasih itu disampaikan kepada:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri., M.Ag. beserta staf dan jajarannya.

2. Dr. KH. Khoiruddin Tahmid, MH selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Ketua jurusan Al- Ahwal Al- Syakhshiyah Bapak Rohmat S.Ag., M.H.I, selaku ketua jurusan dan Bapak Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A selaku Sekretaris Jurusan Al- Ahwal Al- Syakhshiyah .
4. Pembimbing I Ibu Dra. Firdaweri., M. H. I dan pembimbing II Bapak Khoiruddin, M. S. I. yang telah banyak memberikan pengetahuan, masukan dan membimbing dengan penuh kesabaran, kesungguhan serta keikhlasan.
5. Tim Penguji Sidang:
  - a. Bapak H. Rohmat, S.Ag., M.H.I selaku Ketua Sidang
  - b. Bapak Rudi Santoso, M.H.I selaku Sekretaris
  - c. Bapak Dr. H. Khoirul Abror, M.H. selaku ketua sidang
  - d. Ibu Dra. Firdaweri, M.H.I selaku penguji pendamping I
  - e. Bapak Khoiruddin, M.S.I selaku penguji pendamping II
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah, yang telah banyak memberikan ilmu dan pengetahuan, serta staf dan karyawan fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung atas kesediaannya membantu dalam menyelesaikan syarat-syarat administrasi.
7. Pimpinan beserta Staf Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, yang telah memberikan dispensasi dan bantuannya dalam meminjamkan buku-buku sebagai literatur dalam skripsi ini.
8. Teristimewa sahabat dan yang tercinta Sobirin Sangun, Vitatya Monika, Ayu Ratna Dewi Ali ,Rekno Eka Devica, Sela Eviyana, Tri Wahyuni, Vivi Dewi



Andini, Beby bella adelya, Yuliandinni, Awang Hapison, Eriska Permatasari, Fernanda khatami, Febri Saputra, Fauzan Hazmi, Terimakasih atas motivasi, dukungan, doa, dan kebersamaannya.

9. Untuk semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan teman-teman yang kukenal semasa hidupku. *Jazakumullah*.

10. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Semoga Allah SWT memberikan hidayah dan taufiq-Nya sebagai balasan atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan dan semoga menjadi catatan amal ibadah disisi Allah SWT. Aamiin Yarobbal a'lam.



Bandar Lampung, Juli 2019

Penulis

**Gia Noviansah**  
**NPM. 1521010054**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>

### **BAB. I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	2
C. Latar Belakang .....	3
D. Fokus penelitian .....	6
E. Rumusan Masalah .....	7
F. Tujuan dan Signifikasi penelitian.....	7
G. Metode Penelitian.....	8
H. Teknik Analisa Data.....	13

### **BAB II. LANDASAN TEORI**

A. Pengertian Hukum Waris .....	15
B. Dasar Hukum Waris .....	17
C. Rukun, syarat, mewarisi .....	24
D. Macam-macam ahli waris .....	32
1) Ditinjau dari keadaan di lokasi .....	32
2) Ditinjau dari haknya .....	33
E. Asas-asas Hukum Waris.....	50
F. Sebab-sebab Mendapat Warisan dan Tidak Mendapat Warisan ....	59

### **BAB III. LAPORAN HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran umum lokasi penelitian di desa komering putih kecamatan gunung sugih kabupaten Lampung Tengah .....	64
B. Kondisi demografi desa komering putih Lampung Tengah.....	65
C. Praktik pembagian waris anak perempuan di desa komering lampung tengah .....	67
D. Praktik Pembagian Hak Waris Pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun Di Komering Putih Lampung Tengah .....	67

### **BAB IV. ANALISA DATA**

A. Faktor-faktor yang mempengaruhi wanita tidak mendapatkan	
---	--



Waris di desa komering putih Lampung Tengah .....	71
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap wanita yang tidak mendapatkan waris di desa komering putih lampung tengah.....	72

## **BAB V. PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	80
B. Rekomendasi .....	82

## **DAFTAR PUSTAKA**



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Monografi Kecamatan Gunung Sugih Tahun 2018/2019 .....	66
Tabel 2 Jumlah umat beragama di Desa/Kelurahan di Desa Komerling Putih Tahun 2017/201866 .....	66
Tabel 3 Jumlah Sekolah, di desa Komerling Putih, 2017/2018 .....	67
Tabel 4 Jumlah Mayoritas Suku di desa Komerling Putih, Tahun 2017/2018 .	67





## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Surat Izin Riset

Lampiran 2 Daftar Wawancara

Lampiran 3 Lembar Konsultasi

Lampiran 4 Turnitin



## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Penegasan Judul**

Skripsi yang berjudul “Tinjaun Hukum Islam Tentang tidak ada hak waris anak Perempuan (Studi pada masyarakat Lampung Pepadun di Desa Komering Putih Lampung Tengah)”. Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami makna yang terkandung dalam judul skripsi ini, maka perlu diuraikan istilah-istilah penting dari judul diatas, guna untuk menghindari kesalahan dan interprestasi yang berbeda. Beberapa istilah yang perlu mendapat penjelasan antara lain :

Tinjaun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai hasil telaah pandangan, pendapat setelah menyelidiki dan mengamati suatu objek tertentu.<sup>1</sup>

Hukum Islam adalah peraturan-peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan sunal Rasul, tentang tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk agama Islam.<sup>2</sup>

Tinjauan Hukum Islam adalah suatu pandangan.<sup>3</sup> Terkait aturan yang mengatur kehidupan setiap muslim dalam segala aspeknya.<sup>4</sup> Jadi yang di maksud dengan tinjauan hukum Islam adalah hukum yang terus hidup, sesuai dengan dinamika masyarakat. Ia mempunyai gerak yang tetap dan

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,(Jakarta: Balai Pustaka , 1990 ), h. 951

<sup>2</sup> Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*,(Yogyakarta: Gama Media ,2010), h. 23

<sup>3</sup>*ibid* h. 951.

<sup>4</sup> Aulia muthiah, *Hukum Islam Dinamika Perkembangan Seputar Hukum Perkawinan dan Hukum Kewarisan*,( Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2017), h. 15.

perkembangan nya yang terus menerus, karenanya hukum Islam senantiasa berkembang.

Tidak ada hak waris anak perempuan adalah tidak terdapatnya hak waris pada anak perempuan, baik sebelum menikah dan sesudah menikah pada adat Lampung Pepadun di desa Komering Putih yang mendapatkan harta warisan adalah anak laki-laki tertua saja, sedangkan anak laki-laki yang tidak tertua juga tidak mendapatkan harta warisan.

Masyarakat Adat Lampung Pepadun adalah masyarakat yang terdapat diberbagai daerah di provinsi Lampung contohnya di daerah Lampung Tengah yaitu di desa Komering Putih dialek yang dipakai masyarakat Lampung Pepadun banyak menggunakan huruf seperti o (nyo) contohnya (di kedo, lagi nyo), alasan memilih masyarakat adat Lampung Pepadun yang terdapat di desa Komering Putih Lampung Tengah, karena bertempat tinggal atau berdomisili di desa tersebut, dan merupakan anak perempuan, serta tidak adanya keselarasan antara hukum Islam dan hukum adat tentang pembagian hak waris anak perempuan di desa Komering Putih kecamatan Gunung Sugih kabupaten Lampung Tengah.<sup>5</sup>

## **B. Alasan Memilih Judul**

Alasan dalam pemilihan judul penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Secara objektif, permasalahan ini merupakan permasalahan yang menarik untuk dikaji, hal ini di karenakan anak perempuan pada adat Lampung Pepadun di desa Komering Putih Lampung Tengah tidak mendapatkan harta warisan, hanya anak laki-laki tertua yang mendapat warisan, hal

---

<sup>5</sup> [www.indonesiakaya.com](http://www.indonesiakaya.com), diakses pada tanggal 25 September 2019 pukul 12.55



inilah yang menjadikan perlu adanya melakukan penelitian tentang hal tersebut.

2. Secara Subjektif, adanya kesenjangan antara hukum Islam dan hukum adat tentang pembagian warisan di desa Komering Putih Lampung Tengah, oleh sebab itu tertarik untuk membahas persoalan tersebut, yaitu berupa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul “Tinjaun Hukum Islam Tentang tidak ada Waris Anak Perempuan (Studi pada masyarakat Lampung Pepadun di Desa Komering Putih Lampung Tengah)”.

### **C. Latar Belakang Masalah**

Adat Lampung Pepadun adalah salah satu dari dua kelompok adat besar dalam masyarakat Lampung. sistem kewarisan yang mereka pakai adalah berdasarkan geneologis yaitu masyarakat patrilineal.

Masyarakat patrilineal merupakan suatu bentuk masyarakat hukum adat yang menarik Garis keturunan dari pihak laki-laki . Berbeda dengan saibatin yang memiliki budaya kebangsawanan yang kuat. Bangsa Indonesia yang menganut berbagai macam dan kepercayaan mempunyai bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda-beda sistem keturunan yang berbeda-beda ini berpengaruh terhadap sistem kewarisan dalam masyarakat tersebut. Diantara orang-orang Indonesia asli tidak terdapat satu sifat kekeluargaan melainkan diberbagai daerah terdapat berbagai sifat kekeluargaan yang dapat dimasukkan dalam tiga golongan, yaitu :

1. Sifat kebapakan (*patriarchaat*)
2. keibuan (*matriarchaat*)

### 3. Sifat kebapak-ibuan (*parental*)<sup>6</sup>

Hukum waris dalam Islam telah diatur secara baik dan sempurna.<sup>7</sup>

Dasar-dasar kewarisan dalam Islam yaitu berkaitan dengan asas-asas kewarisan yaitu: Asas ijbari (otomatis), Asas Bilateral, Asas individual, Asas keadilan berimbang, dan Asas semata akibat kematian.<sup>8</sup>

Lebih lanjut dikatakan dalam KHI, seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusannya hakim telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena dipersalahkan dengan alasan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris dan dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun atau hukuman yang lebih berat.<sup>9</sup>

Didalam hukum waris adat, secara teoritis dapat dibedakan menjadi tiga bagian yaitu, sistem kewarisan individual yaitu dimana setiap ahli waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing, sistem kewarisan kolektif yaitu dimana harta penginggalan diteruskan dan dialihkan pemiliknya dari pewaris kepada ahli waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan kepemilikannya, sistem kewarisan mayorat dimana pada dasarnya hanya merupakan penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta yang tidak

---

<sup>6</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung : Alumni,1983), h.33

<sup>7</sup>*Ibid.*

<sup>8</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta : Kencana Pranada Media grup. 2008) h. 16.

<sup>9</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: akademi presindo,2010) h.155.

terbagi-bagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga<sup>10</sup>. Di Indonesia berlaku tiga macam hukum waris, yaitu hukum adat, hukum waris Islam, dan hukum waris dari *Burgerlijk Wetboek* (BW). Di Indonesia sistem kekeluargaan yang akan ditetapkan dalam kewarisan adalah sistem *parental* atau *ouderrechtelijk*. sistem ini akan menyatukan hukum waris dari hukum adat dan hukum Islam yang mengangkat prinsip persamaan hak antara kaum laki-laki dan kaum perempuan<sup>11</sup>. Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Prodjojo Hamiddjojo, hukum waris adat itu mempunyai corak dan sifat-sifat tersendiri yang khas dengan Indonesia, yang berbeda dari hukum Islam maupun hukum barat sebab perbedaannya terletak dari latar belakang alam pikiran bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila dengan masyarakat yang Bhineka Tunggal Ika. Latar belakang itu pada dasarnya adalah kehidupan bersama yang bersifat tolong menolong guna mewujudkan kerukunan, keselarasan, dan kedamaian dalam hidup.<sup>12</sup>

Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam Q.S An-nisa: (4) : 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ  
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (النساء : 7)

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta

<sup>10</sup> Zuhraeni, *Serba-Serbi Hukum Adat*, (Fakultas Syariah Uin Raden Intan Lampung, 2018)

<sup>11</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung, Pustaka Setia, 1998) h.17.

<sup>12</sup> Prodjojo Hamiddjojo, *Hukum Waris Indonesia*, (Jakarta: Stensil, 2000), h.51.



peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang Telah ditetapkan.”<sup>13</sup>

Anak perempuan, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. An-nisa: ayat11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ (النساء : 11)

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan..”<sup>14</sup>

Al-qur’an telah menjelaskan secara rinci dan pasti bahwa anak perempuan memiliki bagiannya sebagai ahli waris. Namun, yang terjadi dalam sistem pembagian kewarisan pada adat Lampung Pepadun, Khususnya Desa Komering Putih, Lampung Tengah terjadi kesenjangan atau ketidaksamaan antara hukum adat dengan ketentuan hukum Islam dimana anak perempuan tidak mendapatkan harta warisan baik sebelum menikah dan sesudah menikah, sedangkan dalam hukum Islam sejak lahirpun anak perempuan sudah mendapatkan harta warisan baik sebelum menikah dan sesudah menikah Oleh sebab itu penulis tertarik untuk memecahkan masalahnya melalui penulisan karya ilmiah yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Tentang tidak ada hak Waris anak Perempuan (Studi pada masyarakat Lampung Pepadun di Desa Komering Putih Lampung Tengah)”

---

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1989), h.116.

<sup>14</sup> *Ibid*, 85.

#### **D. Fokus Penelitian**

Dalam penyusunan skripsi ini fokus penelitiannya adalah masyarakat adat pepadun di Desa Komering Putih Lampung Tengah, yaitu anak perempuan yang tidak mendapatk sama sekli harta warisan. dalam hal ini diambil 7 orang yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini yaitu terdiri dari tokoh adat, tokoh agama, anak perempuan dan masyarakat.

#### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang Masalah diatas, maka rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana praktik pembagian waris masyarakat adat Lampung Pepadun di Desa Komering Putih Lampung Tengah?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik waris anak perempuan yang tidak mendapatkan warisan pada masyarakat Lampung Pepadun Desa Komering Putih Lampung Tengah ?

#### **F. Tujuan dan Signifikasi Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi wanita tidak mendapatkan waris studi pada masyarakat adat Lampung Pepadun desa Komering Putih Lampung Tengah.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam mengenai wanita yang tidak mendapatkan waris Pada masyarakat adat Lampung Pepadun.

## 2. Signifikasi Penelitian

Manfaat Penelitian yaitu untuk mengemukakan pernyataan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki nilai guna, baik kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis.

- a. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya mengenai anak perempuan yang tidak mendapatkan harta warisan, karena pada dasarnya sudah ada dalam pembagian hukum waris Islam terhadap anak perempuan, serta memahami masalah seputar pembagian harta warisan pada adat Lampung Pepadun di desa Komering Putih Lampung Tengah dengan hukum waris Islam, sehingga hal tersebut menarik untuk dikaji lebih lanjut. Penelitian ini juga diharapkan juga dapat menjadi bahan referensi atau bahan diskusi bagi para mahasiswa syariah maupun masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan hukum waris Islam.
- b. Secara praktis, Sebagai pelaksana tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

## G. Metode Penelitian

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan. Sedangkan penelitian adalah pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah



yang pemahamannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta.<sup>15</sup>Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara-cara berfikir dan berbuat yang dipersiapkan dengan baik-baik untuk mengadakan penelitian dan untuk mencapai tujuan penelitian.<sup>16</sup>

Metode penelitian merupakan suatu ilmu pengetahuan yang membahas tentang cara-cara yang digunakan dalam mengadakan penelitian yang berfungsi sebagai acuan atau cara yang dilakukan untuk mendapatkan informasi data secara akurat.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

## **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

### **a. Jenis penelitian**

Penelitian lapangan (*Field Research*) atau disebut juga dengan penelitian kancan yaitu penelitian terhadap suatu kancan kehidupan atau lapangan kehidupan masyarakat yang bertujuan menghimpun data atau informasi tentang masalah tertentu mengenai kehidupan masyarakat yang menjadi objek penelitian.<sup>17</sup>Penelitian lapangan ini adalah tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Anak Perempuan Yang Tidak Mendapatkan Harta Warisan pada masyarakat adat

---

<sup>15</sup>Cholid Norobuko dan Ahmad, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1997), h.1.

<sup>16</sup> Kartini KartonoMaju, 1996), *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cetakan ke-7, (Bandung: Mandar Maju) H.20.

<sup>17</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi Ke-4, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 56.

Lampung Pepadun. Maka penelitian ini dilakukan di desa Komerling Putih Lampung Tengah.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analisis* yaitu suatu objek yang bertujuan untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.<sup>18</sup>

**2. Jenis Data dan Sumber Data**

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan yang terdiri dari Tokoh Adat dan juga Masyarakat mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Anak Perempuan yang tidak mendapatkan Harta Warisan di Desa Komerling Putih Lampung Tengah. Sumber data primer dari penelitian ini adalah wawancara dengan Tokoh Adat dan masyarakat yang ada di desa Komerling Putih Lampung Tengah.
- b. Data sekunder adalah sumber data yang mendukung sumber data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu diperoleh dan bersumber dari Al-quran, Hadis, buku-buku dan literatur yang ada hubungannya dengan pokok pembahasan.

**3. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang dapat digunakan untuk membahas masalah yang terdapat dalam penelitian ini yaitu berupa :

---

<sup>18</sup> Kaelani, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: padigma, 2005), h.58.

a. Metode wawancara

Metode wawancara adalah suatu proses tanya jawab lisan dalam dua orang atau lebih berhadapan fisik yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengarkan dengan telinga sendiri.<sup>19</sup>

Penelitian lapangan ini menghimpun data yang disebut wawancara yaitu suatu dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Penulis mewawancara sebanyak 7 orang, yaitu : tokoh adat, tokoh agama, anak perempuan dan masyarakat setempat.

b. Metode observasi

Observasi adalah melakukan pengamatan atau penelitian dan juga pencatatan sistematis fenomena yang diselidiki yang terbatas pada pengamatan yang dilakukan baik secara langsung atau tidak langsung. Observasi yang dilakukan adalah untuk mencocokkan data yang didapat dengan cara wawancara dengan keadaan yang sebenarnya terjadi di masyarakat tersebut. Saya melakukan observasi adalah mencocokkan data hasil wawancara dengan keadaan sebenarnya. Antara lain contohnya Hasil wawancara dengan anak perempuan dia mengatakan bahwa itu sudah menjadi hukum kebiasaan di desa tersebut masyarakat di desa komering putih hanya mengikuti hukum kebiasaan yang ada di desa tersebut sudah terjadi secara turun-temurun marakat tersebut.

---

<sup>19</sup>Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, (Yogyakarta:Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM,1983), h. 192.



#### c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi ialah suatu cara untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, agenda dan surat kabar.<sup>20</sup> Pelaksanaannya dengan mengadakan pencatatan berupa arsip-arsip atau dokumentasi keterangan yang berhubungan dengan gambaran umum lokasi penelitian, serta dengan melihat kasus di lapangan mengenai anak perempuan yang tidak mendapatkan harta warisan.

#### 4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi.<sup>21</sup> Adapun populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat adat Lampung Pepadun di desa Komering Putih Lampung Tengah berjumlah 19.165 orang.

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti, dinamakan penelitian sampel apabila kita bermaksud untuk menggeneralisasikan hasil penelitian sampel. Yaitu mengangkat kesimpulan penelitian sebagai suatu yang berlaku bagi populasi.<sup>22</sup> Adapun sampel dalam penelitian ini yaitu 7 orang dari populasi sebanyak 19.165 orang.

---

<sup>20</sup>Sutrisno Hadi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h.202.

<sup>21</sup>Suharsimi Arikunto, *prosedur penelitian, suatu pendekatan praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2014), h.173

<sup>22</sup>*Ibid.*, h. 174-175

## 5. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul kemudian diolah, pengolahan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*Editing*) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar sesuai, atau relevan dengan masalah.
- b. Penandaan data (*Coding*) yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku-buku literatur, dan data lain yang berkenaan dengan pembahasan).<sup>23</sup> Dalam hal ini penulis mengklarifikasi data sesuai masing-masing pokok bahasan dengan tujuan untuk mengkaji data secara sempurna dan untuk memudahkan analisa.
- c. Sistematisasi data (*sistematising*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

## H. Teknik Analisa Data

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu suatu pendekatan dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian.

Pengolahan analisis data ini akan digunakan metode analisis yaitu metode berfikir induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau

---

<sup>23</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 126.

peristiwa-peristiwa yang konkrit kemudian dari fakta itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.<sup>24</sup>

Metode ini digunakan untuk menganalisa data untuk kemudian mengambil sebuah kesimpulan yang bersifat umum. Metode ini yang akan penulis gunakan untuk menyaring atau menimbang data yang telah terkumpul, dan dengan metode ini juga, data dianalisis sehingga didapatkan jawaban yang benar dari pembahasan skripsi ini.



---

<sup>24</sup>Sutrisno Hadi, *Ibid*, h.80.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Pengertian Hukum Waris

Islam mengenal hukum waris sebagai fiqh mawaris, fiqh mawaris berasal dari bahasa arab, fiqh dan mawaris. fiqh adalah memahami dan mengetahui wahyu (alqur'an dan hadis) dengan menggunakan penalaran akal dan metode tertentu, sehingga diketahui ketentuan hukumnya dengan dalil-dalil secara rinci. sedangkan mawaris berasal dari bahasa arab, *al-muwaris* yang berarti harta peninggalan yang diwarisi oleh ahli warisnya.<sup>25</sup> jadi fiqh mawaris adalah suatu disiplin ilmu tentang harta peninggalan, tentang bagian proses pemindahan, siapa saja yang berhak menerima harta peninggalan itu serta berapa bagian masing-masingnya.<sup>26</sup>

Menurut imam syafi'i bahwa fiqh ialah suatu ilmu yang menerangkan segala hukum syara' yang berhubungan dengan amaliyah, dipetik dari dalil-dalilnya yang jelas (*tafshili*). Maka dia melengkapi hukum-hukum yang difahami para mujtahid dengan jalan ijtihad dan hukum yang tidak diperlukan ijtihad, seperti hukum yang dinaskan dalam Al-Qur'aan, As-sunnah.<sup>27</sup> Menurut Ahmad Hanafi bahwa fiqh menurut bahasa (*lughah*) ialah memahami pembicaraan seseorang yang berbicara. Menurut istilah ialah ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara' yang amaliyah yang diambil dari dalil-dalilnya yang tafshili. Dia suatu ilmu yang diistimbatkan (diambil)

---

<sup>25</sup>Firdaweri, *Fiqh Mawaris*, (Fakultas Syari'ah; Bandar Lampung 2008), h.1-3.

<sup>26</sup>Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Alqur'an Dan Hadis*, (Jakarta : Tintamas, 1982),h.10.

<sup>27</sup> Muhammad bin Idris Asy-syafi'I, *Al-Um*, Juz III, (Kairo : Kitab Al-Sya'bi, 1968), h.39.



dengan jalan pemikiran dan ijtihad. Dia memerlukan pemikiran dan renungan. Oleh karena itu, tidak boleh dinamakan Allah dengan *faqih*, karena tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi baginya.<sup>28</sup> Menurut Hazairin dalam bukunya Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'aan dan Hadis, beliau menulis *fiqh* adalah hasil pemikiran manusia yang dapat melahirkan suatu norma dengan berdasarkan kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Namun karena *fiqh* hasil pemikiran manusia, tentunya mengenal batas-batas tertentu sebagaimana ilmu-ilmu yang lain. Pemikiran itu berada dalam batas-batas disiplinnya, yaitu dengan metode dan sumber diatas maka tidak setiap hasil pemikiran manusia dapat difahami sebagai *fiqh*.<sup>29</sup>

Hukum waris Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari dari seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-masing ahli waris, menentukan harta peninggalan dan harta warisan bagi orang yang meninggal dimaksud.<sup>30</sup>

Dalam pengertian lain hukum kewarisan islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1961), h.7.

<sup>29</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur' aan Dan Hadis*, (Jakarta : Tintamas, 1982), h.10.

<sup>30</sup> Zainuddin Ali, *pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.33.

<sup>31</sup> Supriyadi, "*Pilihan Hukum Kewarisan Dalam Masyarakat Pluralistik (Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata)*", Jurnal Al Adalah, Vol. XII No. 3 Juni 2015, (Kudus: Fakultas Syari'ah STAIN Kudus, 2014) h.558. (On-Line), tersedia di:

## B. Dasar Hukum Waris

Allah telah mensyariatkan dalam Al-Qur'an setiap manusia telah memiliki hak dan kewajibannya masing-masing terhadap harta warisan maupun harta peninggalan, dalam al-qur'an telah dijelaskan bagian-bagian waris terhadap harta warisan yaitu yang terdapat dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

### 1. Q.S An-nissa (4) ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ  
أُنثَيَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ  
وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ  
أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ  
يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا  
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (النساء : 11)

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak)

manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”<sup>32</sup>

Bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskwin dan memberi nafkah.

## 2. Q.S An-nissa (4) ayat 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ  
لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ أَلْرُبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ  
دَيْنٍ وَلَهُنَّ أَلْرُبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ  
لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ  
دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ  
وَاحِدٍ مِّنْهُمَا أَلْسُدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي  
أَلثُّلثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ  
عَلِيمٌ حَلِيمٌ (النساء : 12)

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika Isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak,

<sup>32</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Terjemah dan penafsir Al-qur'an, 1971), h.94

tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika Saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.<sup>33</sup>

Ayat tersebut menjelaskan hal-hal yang dapat menimbulkan mudharat kepada waris itu ialah tindakan-tindakan seperti: a. mewasiatkan lebih dari sepertiga harta pusaka. b. berwasiat dengan maksud mengurangi harta warisan. sekalipun kurang dari sepertiga bila ada niat mengurangi hak waris, juga tidak diperbolehkan.

### 3. Q.S An-Nisa' (4) ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (النساء : 7)

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang Telah ditetapkan.”<sup>34</sup>

### 4. Q.S An-Nisa' (4) ayat 8:

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا (النساء : 8)

<sup>33</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Terjemah dan penafsir Al-qur'an, 1971), h.117

<sup>34</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Terjemah dan penafsir Al-qur'an, 1971), h.116



“Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.”<sup>35</sup>

Yang dimaksud kerabat disini adalah kerabat yang tidak mempunyai hak warisan dari harta benda pusaka.dan yang dimaksud pemberian sekedarnya itu tidak boleh lebih dari sepertiga harta warisan.

**5. Q.S An-Nisa’(4) ayat 9:**

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (النساء : 9)

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”<sup>36</sup>

**6. Q.S An-Nisa’(4) ayat 10:**

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا  
وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا (النساء : 10)

“Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, Sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).”<sup>37</sup>

<sup>35</sup> Ibid., h.116

<sup>36</sup> Ibid., h.116

<sup>37</sup> Ibid., h.116

**7. Q.S An-nisa'(4) ayat 14:**

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ (النساء : 14)

“Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.”<sup>38</sup>

**8. Q.S An-Nisa'(4) ayat 19:**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (النساء : 19)

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang Telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”<sup>39</sup>

Ayat ini tidak menunjukkan bahwa mewariskan wanita tidak dengan jalan paksa dibolehkan. menurut adat sebahagian Arab Jahiliyah apabila seorang meninggal dunia, Maka anaknya yang tertua atau anggota keluarganya yang lain mewarisi janda itu. janda tersebut boleh dikawini

<sup>38</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Terjemah dan penafsir Al-qur'an, 1971), h.118

<sup>39</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Terjemah dan penafsir Al-qur'an, 1971), h.119

sendiri atau dikawinkan dengan orang lain yang maharnya diambil oleh pewaris atau tidak dibolehkan kawin lagi.

**9. Q.S An-Nisa'(4) ayat 33:**

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلَىٰ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ  
أَيْمَانُكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيحُهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا  
(النساء : 33)

“Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang kamu Telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.”<sup>40</sup>

**10. Q.S Al-anfal (8) ayat 72:**

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ  
وَالَّذِينَ ءَاوُوا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ  
يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِّنْ وَلِيَّتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا ۚ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي  
الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَقٌ ۖ وَاللَّهُ بِمَا  
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (الأنفل : 72)

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan (kepada orang-orang Muhajirin), mereka itu satu sama lain lindung-melindungi. dan (terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, Maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah. (akan tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam

<sup>40</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Terjemah dan penafsir Al-qur'an, 1971), h.122

(urusan pembelaan) agama, Maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang Telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka. dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”<sup>41</sup>

Yang dimaksud lindung melindungi ialah: di antara muhajirin dan anshar terjalin persaudaraan yang amat teguh, untuk membentuk masyarakat yang baik. demikian keteguhan dan keakraban persaudaraan mereka itu, sehingga pada pemulaan Islam mereka waris-mewarisi seakan-akan mereka bersaudara kandung.

#### 11. Q.S Al-Anfaal (8) ayat 75:

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا  
الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (الأنفل :  
75)

“Dan orang-orang yang beriman sesudah itu Kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam Kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”<sup>42</sup>

Maksudnya dari ayat tersebut yang jadi dasar waris mewarisi dalam Islam ialah hubungan kerabat, bukan hubungan persaudaraan keagamaan sebagaimana yang terjadi antara muhajirin dan anshar pada permulaan Islam.<sup>43</sup> Meskipun Alquran sudah memberikan ketentuan terperinci mengenai pembagian harta warisan, dalam beberapa hal masih diperlukan adanya ijtihad, yaitu terhadap hal-hal yang tidak ditentukan dalam alquran.

<sup>41</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Terjemah dan penafsir Al-qur'an, 1971), h.274

<sup>42</sup> *Ibid.*, h.274

<sup>43</sup> *Ibid.*, h.,100



Contohnya, status saudara-saudara yang mewarisi bersama-sama dengan kakek. Di dalam alquran hal ini tidak dijelaskan. Yang dijelaskan hanyalah status saudara-saudara bersama-sama dengan ayah atau bersama dengan anak laki-laki yang dalam kedua keadaan ini mereka tidak mendapatkan apa-apa lantaran terhibab, kecuali dalam masalah kalalah maka mereka mendapatkan bagian.<sup>44</sup>

### **C. Rukun dan Syarat Mewarisi**

#### **a. Rukun-rukun mewarisi ada 3 yaitu :**

##### **1. Harta warisan**

Harta warisan (mauruuts) adalah harta benda yang ditinggalkan si mayat yang akan diwarisi oleh para ahli waris setelah di keluarkan untuk biaya-biaya perawatan dan penyelenggaraan jenazah, melunasi hutang dan melaksanakan wasiat<sup>45</sup>.

Harta peninggalan dalam kitab fiqh biasa disebut tirkah, yaitu semua yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia berupa harta secara mutlak. Tetapi jumhur fuqaha berpendapat bahwa tirkah ialah segala yang menjadi milik seseorang, baik harta benda maupun hak-hak kebendaan yang ditinggalkan meninggal dunia.

##### **2. Orang yang meninggalkan harta warisan atau pewaris**

Muwarrits adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta waris. Didalam bahasa indonesia disebut pewaris, didalam kitab fiqh disebut muwarrits. Harta yang dimiliki muwarrits adalah miliknya

---

<sup>44</sup> Ahmad Ahzar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004) h.9

<sup>45</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung, PT Almarif, 1971), h.36

sempurna, dan dia benar-benar telah meninggal dunia, baik menurut kenyataan maupun hukum. Kematian muwarrits menurut para ulama fiqh dibedakan menjadi 3 macam yaitu:

a. Mati haqiqy ( mati sejati)

Mati haqiqy adalah hilangnya nyawa seseorang, dan kematian ini dapat di saksikan dengan panca indra dan dapat dibuktikan dengan alat pembuktian.

b. Mati hukmy ( mati berdasarkan keputusan hakim)

Mati hukmy adalah kematian berdasarkan vonis hakim, dalam hal ini ada 2 macam yaitu :

- 1) Walaupun pada hakikatnya orang tersebut masih hidup seperti orang yang di vonis mati bagi orang-orang yang murtad (orang yang keluar dari agama islam)
- 2) Kemungkinan antara hidup dan mati, seperti vonis kematian terhadap orang yang mafqud yaitu orang yang tidak diketahui kabar beritanya, dan tidak domisili, dan tidak diketahui hidup dan matinya.

Jika hakim telah menjatuhkan vonis mati terhadap dua jenis orang tersebut, maka berlakunya sejak tanggal yang termuat dalam vonis hakim, walaupun terjadi murad dan perginya si mafqud sudah 15 tahun sebelum vonis, dan harta warisannya baru dapat diwarisi oleh ahli warisnya sejak tanggal yang termuat dalam vonis tersebut. Oleh karena itu para ahli waris yang masih hidup sejak vonis

kematiannya berhak mewarisi, karena muwarrits (pewaris) seolah-olah telah mati sejati disaat vonis sijatuhkan. Ahli waris yang mati mendahului vonis hakim tidak berhak terhadap harta warisan tersebut.

c. Mati takdiri ( mati menurut dugaan )

Mati takdiri adalah suatu kematian yang bukan haqiqi dan bukan hukmy, tetapi hanya semata-mata hanya berdasarkan dugaan keras. Misalnya kematian bayi yang baru dilahirkan akibat pemaksaan agar ibunya minum racun. Kematian tersebut hanya semata-mata berdasarkan dugaan keras, dapat juga disebabkan oleh yang lain, namun kuatnya perkiraan atas akibat perbuatan semacam itu<sup>46</sup>.

3. Orang yang menerima waris/ahli waris

Ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima harta warisan dari pewarisnya. Orang-orang yang menjadi ahli waris semuanya berjumlah 25 orang. Ahli waris tersebut jika di klasifikasikan menurut jenis kelamin dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu :

a) Ahli waris yang laki-laki

Ahli waris yang laki-laki semuanya berjumlah 15 orang yaitu:

1) Anak laki-laki.

2) Cucu laki-laki dari anak laki-laki.

---

<sup>46</sup> Fatchur Rahman, *Ibid.*, h.80

- 3) Ayah
- 4) Kakek yaitu ayah dari ayah, sekalipun yang teratas, seperti ayah dari ayah dari ayah (kakeknya ayah)
- 5) Saudara laki-laki sekandung
- 6) Saudara laki-laki sebapak
- 7) Saudara laki-laki seibu
- 8) Keponakan laki-laki ( anak laki-laki dari yang nomor 5), yaitu anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, sekalipun yang terjauh, seperti anak laki-laki dari anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung
- 9) Keponakan laki-laki ( anak laki-laki dari yang nomor 6), yaitu anak laki-laki dari saudara laki-laki se ayah, sekalipun yang terjauh, seperti anak laki-laki dari anak laki-laki dari saudara laki-laki se ayah
- 10) Paman kandung yaitu saudara laki-laki yang kandung oleh ayah, sekalipun yang teratas, seperti paman dari ayah
- 11) Paman se ayah yaitu saudara laki-laki yang se ayah oleh ayah, sekalipun yang teratas. Seperti paman seayah oleh ayah.
- 12) Anak laki-laki dari paman yang kandung sekalipun yang terbawah. Seperti anak laki-laki dari anak laki-laki dari paman yang kandung
- 13) Anak laki-laki dari paman se ayah sekalipun yang terbawah seperti anak laki-laki dari anak laki-laki dari paman seayah.



14) Suami

15) Orang laki-laki yang memerdekakannya

Apabila ahli waris yang laki-laki ini ada semuanya, maka hanya tiga ahli waris yang mendapatkan harta warisan, yaitu :

- 1) Suami
- 2) Ayah
- 3) Anak laki-laki

b) Ahli waris yang perempuan

Ahli waris yang perempuan semuanya berjumlah 10 orang yaitu :

- 1) Anak perempuan
- 2) Cucu perempuan dari anak laki-laki, sekalipun yang terbawah seperti anak perempuan dari anak laki-laki dari anak laki-laki
- 3) Ibu
- 4) Nenek perempuan yaitu ibu dari ibu sekalian yang teratas, yaitu ibu dari ibu dari ibu
- 5) Nenek perempuan yaitu ibu dari ayah, sekalipun yang teratas, yaitu ibu dari ayah dari ayah
- 6) Saudara perempuan yang kandung
- 7) Saudara perempuan yang se ayah
- 8) Saudara perempuan yang se ibu
- 9) Istri, sekalipun istri itu dalam masa iddah yang boleh di rujuk
- 10) Orang perempuan yang memerdekakannya

## **b. Syarat-syarat mewaris**

Mewarisi adalah penggantian kedudukan dalam memiliki harta benda antara orang yang telah meninggal dunia dengan ahli waris.

Mewarisi memiliki syarat-syarat tertentu, yaitu :

1. Sudah terang mati orang yang diwarisi itu dengan sejelas-jelasnya sebagai yang dijelaskan diatas, bahwa mati muwarrits (pewaris) itu menurut para ulama dibedakan kepada 3 macam, yaitu mati haqiqy, mati hukmy, dan mati taqdiry.
2. Terang hidupnya ahli waris disaat kematian muwarritsnya atau ahli waris yang benar-benar hidup disaat kematian pewarisnya atau terang hidupnya ahli waris itu menurut putusan hakim. Seperti seorang ahli waris yang hilang, kemudian hakim memutuskan dia masih hidup karena mengingat belum lama masa hilangnya.

Syarat-syarat waris mewarisi diatas menimbulkan problema bagi ahli waris, antara lain :

- a) Ahli waris yang mafqud

Apabila ahli waris yang mafqud telah mendapatkan vonis hakim tentang kematiannya, dan vonis tersebut telah mendahului kematian pewarisnya, hal ini tidak menimbulkan kesulitan, karena yang demikian terang ahli waris tersebut tidak berhak atas harta warisan karena dia sudah mati lebih dahulu. Tetapi yang menimbulkan kesulitan bila ahli waris yang mafqud belum

mendapatkan vonis yang tetap dari hakim tentang kematiannya disaat pewarisnya meninggal dunia.<sup>47</sup>

b) Ahli waris anak yang masih dalam kandungan

Anak dalam kandungan berhak memperoleh bagian yang sedang ditahan untuknya bila dia dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan hidup, kelahiran dalam keadaan hidup ini membuktikan bahwa dia benar-benar hidup disaat kematian pewarisnya.

c) Ahli waris yang mati berbarengan

Dua orang atau lebih dari orang-orang yang saling berhak waris mewarisi yang mati berbarengan. Seperti seorang bapak bersama anak-anaknya dan isterinya mati dalam kecelakaan pesawat air asia tenggelam bersama-sama dilautan, maka diantara mereka tidak dapat saling mewarisi, karena tidak jelas hidupnya disaat kematian pewarisnya. Dengan kata lain tidak diketahui siapa yang mati duluan. Harta warisan mereka diwarisi oleh para ahli warisnya yang benar-benar masih hidup disaat kematian mereka.

3. Tidak ada penghalang-penghalang mewarisi

Biarpun dua syarat waris mewarisi itu telah ada pada pewaris dan ahli waris, namun pewaris tidak dapat mewariskan harta warisannya kepada ahli warisnya, atau ahli waris tidak dapat mewarisi harta warisan dari pewarisnya selama masih terdapat

---

<sup>47</sup> Muhammad Muhyidin Abdul Hamid, *Panduan Waris Empat Madzhab*, (Jakarta : al-kautsar,2009) h.12

salah satu dari penghalang-penghalang mewarisi (*mawaani' al-irts*).

Yang menghalangi mendapatkan warisan ada 3 macam :

a. Berlainan agama.

Yang dimaksud berlainan agama adalah berlainan agama antara pewaris dengan ahli waris. Pewaris beragama Islam dan ahli waris beragama non Islam. Mereka terhalang untuk saling mewarisi.

Apabila seorang ahli waris yang berbeda agama beberapa saat sesudah meninggalnya pewarisnya lalu dia masuk Islam, sedangkan harta warisannya belum dibagi, maka ahli waris yang baru masuk Islam itu tetap terhalang untuk mendapatkan harta warisan, karena timbulnya hak mewarisi tersebut adalah sejak adanya kematian orang yang mewariskan (pewaris), bukan saat kapan dimulai pembagian warisan. Hal ini disebabkan saat kematian pewaris, ia masih dalam keadaan non muslim (kafir). Mereka dalam keadaan berlainan agama.

b. Membunuh

Jumhur fuqahak sepakat menetapkan bahwa pembunuhan pada prinsipnya menjadi penghalang untuk mendapatkan harta warisan bagi si pembunuh terhadap harta warisan orang yang dibunuhnya. Seorang yang membunuh pewarisnya, dia tidak

berhak mewarisi harta warisannya., baik pembunuhan itu dilakukan dengan sengaja ataupun tersalah.

c. Menjadi budak (perbudakan)

Menjadi budak (hal ini tidak ada di Negara Indonesia), yaitu orang yang menjadi budak tidak bisa waris mewarisi dengan kaum kerabatnya atau keluarganya. Dan keluarganyapun tidak bisa menerima waris dari dia, karena budak itu sendiri dan hartanya adalah milik tuannya.

**D. Macam-Macam Ahli Waris**

**1. Ditinjau dari keadaan di lokasi**

Didalam hukum waris adat, secara teoritis dapat dibedakan menjadi tiga macam sistem kewarisan, yaitu :

- a. Sistem kewarisan individual adalah sistem kewarisan dimana setiap waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Setelah harta waris itu diadakan pembagian, maka masing-masing waris dapat menguasai dan memiliki bagian harta warisannya untuk diusahakan, dinikmati ataupun dialihkan (dijual) kepada sesama waris, anggota kerabat, tetangga, ataupun oranglain.
- b. Sistem kewarisan kolektif adalah sistem kewarisan dimana harta peninggalan diteruskan dan dialihkan pemiliknya dari pewaris kepada waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan



kepemilikan, melainkan setiap waris berhak untuk mengusahakan, menggunakan atau mendapat hasil dari harta peninggalan itu.

- c. Sistem kewarisan mayorat adalah suatu sistem dimana pada dasarnya hanya merupakan penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta yang tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga, atau kepala keluarga menggantikan posisi ayah atau ibu sebagai kepala keluarga.

Anak tertua dalam kedudukannya sebagai penerus tanggung jawab orangtua yang berkewajiban mengurus dan memelihara saudara-saudaranya yang lain, terutama bertanggung jawab atas harta warisan dan kehidupan adik-adiknya yang masih kecil sampai mereka berumah tangga dan berdiri sendiri dalam suatu kekerabatan mereka yang turun temurun.

Sedangkan masyarakat adat didesa Komerang Putih Lampung Tengah mereka termasuk kelompok masyarakat hukum adat geneologis khususnya masyarakat patrilineal, yaitu suatu bentuk masyarakat hukum adat yang menarik garis keturunan dari pihak laki-laki, yang mana seluruh harta warisan jatuh kepada anak tertua laki-laki dan anak perempuan tidak mendapatkan harta warisan.

## **2. Ditinjau dari haknya**

### **a. Ashabah**

Pengertian ashabah adalah ahli waris yang mendapat bagian tidak tertentu, menurut etimologi ashabah berarti pembela, penolong, pelindung, atau kerabat dari jurusan ayah. Menurut istilah *faradhiyun* ,

ashabah adalah ahli waris yang dalam penerimaannya tidak ada ketentuan yang pasti. Ada tiga kemungkinan untuk penerimaan *ashabah*:

- 1) Mungkin mengambil seluruh harta warisan jika *ashabul furudh* tidak ada
- 2) Mungkin mengambil sisa harta setelah dibagikan kepada *ashabul furudh*
- 3) Mungkin tidak mendapat harta sama sekali jika harta habis oleh ahli waris *ashabul furudh*

Ahli waris *ashabah* dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu :

- 1) *Ashabah Bin nafsi* (ashabah dengan sendirinya)  
*Ashabah Bin nafsi* adalah *ashabah* dengan sendirinya. Yaitu ahli waris yang laki-laki yang langsung pertaliannya kepada si mayat dengan dirinya sendiri, seperti anak laki-laki dari anak laki-laki, dengan perantara anak laki-laki. Maka saudara laki-laki seibu tidak menjadi *ashabah bin nafsi*, karena pertaliannya kepada si mayat dengan perantara ahli waris yang perempuan yaitu ibu. *Ashabah bin nafsi* disebut juga ahli waris yang langsung menjadi *ashabah* dengan sendirinya, tanpa disebabkan oleh orang lain.<sup>48</sup>

Ahli waris *ashabah bin nafsi* ada 13 macam, yaitu :

- a) Anak laki-laki.
- b) Anak laki-laki dari anak laki-laki (cucu laki-laki walaupun sampai kebawah) Ayah, jika si mayat tidak mempunyai anak laki-laki dan cucu ( anak laki-laki dari anak laki-laki)

---

<sup>48</sup> Muhammad Ali Al-sabouni, *Hukum Kewarisan*, (Jakarta : Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2005), h.88

- c) Ayah dari ayah ( kakek )
- d) Saudara laki-laki yang kandung
- e) Saudara laki-laki seayah
- f) Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung ( keponakan)
- g) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah ( keponakan)
- h) Paman kandung.
- i) Paman seayah
- j) Anak laki-laki paman kandung.
- k) Anak laki-laki paman seayah.

l) Penghulu yang memerdekakan budak (sekarang budak tidak ada lagi)

2) *Ashabah Bil ghairi* ( ashabah disebabkan orang lain )

*Ashabah Bilghairi* yaitu ashabah disebabkan orang lain. Yaitu Orang perempuan yang menjadi *ashabah* disebabkan ada orang laki-laki yang sederajat dengannya yang membawa dia menjadi *ashabah*. Kalau laki-laki itu tidak ada dia tidak menjadi *ashabah*, tetpi dia menjadi *ashabul furudh* biasa. Dalam masalah ini laki-laki mendapat dua kali bagian perempuan.

3) *Ashabah Ma'al ghairi* ( ashabah beserta orang lain )

*Ashabah Ma'al ghairi* ( ashabah beserta orang lain ) Yaitu perempuan yang menjadi ashabah atau mengambil sisa ketika bersama dengan perempuan lain.

Ahli waris yang menjadi ashabah ma'al ghairi ada dua macam, yaitu:

- a) Saudara perempuan yang kandung.

b) Saudara perempuan yang seayah.

Kedua macam ini ketika bersama dengan anak perempuan, atau ketika bersama anak perempuan dari anak laki-laki ( cucu perempuan ).

## **b. Ashhabul furudh**

### **1) Pengetian *ashabul furudh***

*Ashabul furudh* atau *ahlul furudh* atau *dzawil furudh* adalah ahli waris yang mendapat bagian yang tertentu, yaitu yang mempunyai bagian harta warisan yang sudah ditentukan dalam Al-Qur'an dan, As-Sunnah dan Ijma'. Bagian yang sudah ditentukan itu adalah :  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{8}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{2}{3}$ , dan  $\frac{1}{6}$ . Orang-orang yang menjadi ahli waris *ashabul furudh* ini berjumlah 25 orang yang terdiri 15 orang laki-laki dan 10 orang perempuan sebagaimana telah dijelaskan diatas pada keterangan ahli waris. Ahli waris yang menjadi *ashhabul furudh* ada 12 orang.<sup>49</sup>, yaitu:

- a) Suami
- b) Isteri
- c) Ayah
- d) kakek ( ayah dari ayah ) kakek mendapat bagian kalau ayah tidak ada
- e) ibu

---

<sup>49</sup> Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad Al-Husaini, Juz II, *Kifayatul Ahyar*, (Bandung Syirkatul Ma'arif. 1983), h. 31.

f) nenek ( ibu dari ibu dan ibu dari ayah ) nenek mendapat bagian kalau ibu tidak ada

g) anak perempuan

h) anak perempuan dari anak laki-laki

i) saudara perempuan kandug

j) saudara perempuan seayah

k) saudara laki-laki seibu

l) saudara perempuan seibu

## **2) Bagian atau Hak Ahli Waris Ashhabul furudh.**

a) bagian suami ( $\frac{1}{2}$  atau  $\frac{1}{4}$  )

bagian suami ada 2 macam :

(1) suami mendapat  $\frac{1}{2}$  bila simayit tidak mempunyai anak dan cucu ( anak dari anak laki-laki )

(2) suami mendapat  $\frac{1}{4}$  bila simayat mempunyai anak atau cucu (anak dari anak laki-laki)`

b) bagian isteri (  $\frac{1}{4}$  atau  $\frac{1}{8}$  )

bagian isteri Ada 2 macam :

(1) isteri mendapat  $\frac{1}{4}$  bila simayat tidak mempunyai anak dan cucu ( anak dari anak laki-laki )

(2) isteri mendapat  $\frac{1}{8}$  bila simayit mempunyai anak atau cucu ( anak dari anak laki-laki )

c) bagian ayah (  $\frac{1}{6}$  atau  $\frac{1}{6}$  + ashabah binnafsi atau ashabah bin nafsi )



bagian ayah ada 3 macam, yaitu :

- (1) ayah mendapat  $\frac{1}{6}$  bila simayit mempunyai anak laki-laki atau cucu (anak laki-laki dari anak laki-laki)
- (2) ayah mendapat  $\frac{1}{6}$  + ashabah binnafsi bila simayit mempunyai anak perempuan atau cucu perempuan ( anak perempuan dari anak laki-laki), dan harta masih berlebih.
- (3) Ayah mendapat ashabah bin nafsi bila simayat tidak mempunyai anak, atau cucu ( anak laki-laki dari anak laki-laki).

d) Bagian kakek ( $\frac{1}{6}$  atau  $\frac{1}{6}+$  ashabah binnafsi atau ashabah bin nafsi )

Kakek yang menjadi ahli waris adalah ayah dari ayah, meskipun yang teratas seperti ayah dari ayah dari ayah dan begitu selanjutnya. Adapun kakek yang bertalian dari ibu, seperti ayah dari ibu, dan ayah dari ibu dari ayah tidak menjadi waris, hanya ia termasuk golongan dzawil arham.

Bagian kakek ( ayah dari ayah ) ada tiga macam yaitu :

- (1) Kakek mendapat  $\frac{1}{6}$  bila simayit mempunyai anak laki-laki atau cucu ( anak laki-laki dari anak laki-laki ).
- (2) Kakek mendapat  $\frac{1}{6}$  + ashabah binnafsi bila simayat mempunyai anak perempuan atau cucu perempuan ( anak perempuan dari anak laki-laki ), dan harta masih berlebih.

(3) Kakek mendapat ashabah binnafsi bila simayat tidak mempunyai anak, dan anak-anak laki-laki.

e) Bagian ibu (  $\frac{1}{6}$  atau  $\frac{1}{3}$  )

Bagian ibu ada dua macam, yaitu :

(1) Ibu mendapat  $\frac{1}{6}$  bila simayat mempunyai anak ( baik anak itu laki-laki atau perempuan ) atau cucu ( anak dari anak laki-laki, baik cucu itu laki-laki atau perempuan ( atau bila simayat mempunyai berbilang saudara, baik kandung, atau seapak atau seibu, baik laki-laki maupun perempuan atau saudara-saudara itu bercampur baur, baik saudara-saudara itu menjadi waris atau berhijab.

(2) Ibu mendapat  $\frac{1}{3}$  syaratnya adalah kebalikan dari ibu mendapat  $\frac{1}{6}$ , yaitu bila simayat tidak mempunyai anak, atau cucu ( anak dari anak laki-laki ) dan berbilang saudara. Apabila saudara itu hanya satu orang ibu tetap mendapat bagian sepertiga.

f) Bagian nenek (ibu dari ibu dan ibu dari ayah)

Bagian nenek satu macam saja, yaitu  $\frac{1}{6}$ ..Nenek bagiannya satu macam saja yaitu  $\frac{1}{6}$ , dengan syarat ibu simayat tidak ada, jika si mayat mempunyai ibu, nenek terhibab atau tidak mendapat bagian. Kalau nenek itu lebih dari 1 orang, mereka berserikat pada bagian  $\frac{1}{6}$  itu, dengan pembagian yang sama banyak.

g) Bagian anak perempuan ( $\frac{1}{2}$  atau  $\frac{2}{3}$  atau ashabah bil ghairi)

Bagian anak perempuan ada 3 macam :

(1) Anak perempuan mendapat  $\frac{1}{2}$  bila dia sendiri dan tidak ada anak laki-laki dari si mayat.

(2) Anak perempuan mendapat  $\frac{2}{3}$  bila anak perempuan itu dua orang atau lebih, dan tidak ada anak laki-laki dari si mayat.

(3) Anak perempuan menjadi ashabah bil ghairi bila bersama anak laki-laki dari si mayat. Dalam hal ini anak laki-laki mendapat dua kali bagian anak perempuan. Artinya jika berhimpun anak laki-laki dengan anak perempuan, maka anak laki-laki dihitung 2 kepala, dan anak perempuan dihitung satu kepala.

h) Bagian anak perempuan dari anak laki-laki atau cucu perempuan dari anak laki-laki ( $\frac{1}{2}$  atau  $\frac{2}{3}$  atau  $\frac{1}{6}$  atau ashabah bil ghairi ).

Bagiannya ada 4 macam, yaitu :

(1) Cucu perempuan mendapat  $\frac{1}{2}$  dengan syarat :

(a) Jika ia seorang diri

(b) Jika tidak ada anak dari si mayat, baik anak perempuan maupun anak laki-laki

(c) Jika tidak ada saudaranya yang laki-laki

(2) Cucu perempuan mendapat  $\frac{2}{3}$  dengan syarat :

- (a) Jika ia dua orang atau lebih
- (b) Jika tidak ada anak si mayat baik anak perempuan maupun anak laki-laki
- (c) Jika tidak ada saudaranya yang laki-laki, yaitu anak laki-laki dari anak laki-laki

(3) Cucu perempuan mendapat  $\frac{1}{6}$  dengan syarat :

- (a) Jika ada satu orang anak perempuan dari simayat
- (b) Jika tidak ada anak laki-laki dari si mayat dan dua orang anak perempuan
- (c) Jika tidak ada saudaranya yang laki-laki yaitu anak laki-laki dari anak laki-laki

(4) Cucu perempuan mendapat ashabah bil ghairi dengan syarat :

- (a) Jika ada saudaranya yang laki-laki
- (b) Jika tidak ada anak laki-laki dari si mayat

i) Bagian saudara perempuan kandung ( $\frac{1}{2}$  atau  $\frac{2}{3}$  atau ashabah bil ghairi atau ashabah maal ghairi)

Bagian saudara perempuan kandung ada 4 macam, yaitu :

(1) Saudara perempuan kandung mendapat  $\frac{1}{2}$  dengan syarat:

- (a) Jika dia seorang saja
- (b) Jika tidak ada saudaranya yang laki-laki

(2) Saudara perempuan mendapat  $\frac{2}{3}$  dengan syarat :

- (a) Jika dia dua orang atau lebih
- (b) Jika tidak ada saudaranya yang laki-laki

(3) Saudara perempuan kandung mendapat ashabah bil ghairi dengan syarat ada saudaranya yang laki-laki.

Dalam hal ini laki-laki mendapat dua kali bagian yang perempuan

(4) Saudara perempuan kandung mendapat ashabah maal ghairi dengan syarat :

- (a) Jika ada anak perempuan dari simayat atau cucu perempuan ( anak perempuan dari anak laki-laki)
- (b) Jika tidak ada saudara laki-laki yang kandung.

(5) Bagian saudara perempuan yang seayah (  $\frac{1}{2}$  atau  $\frac{2}{3}$  atau  $\frac{1}{6}$  atau ashabah bil ghairi atau ashabah maal ghairi

(a) Saudara perempuan yang seayah mendapat  $\frac{1}{2}$  dengan syarat :

1. Jika ia seorang saja
2. Jika tidak ada saudara perempuan yang kandung
3. Jika tidak ada saudara yang laki-laki

(b) Saudara perempuan yang seayah mendapat  $\frac{2}{3}$  dengan syarat :

1. Jika ada 2 orang atau lebih
2. Jika tidak ada saudara perempuan yang kandung



3. Jika tidak ada saudaranya yang laki-laki

(c) Saudara perempuan seayah mendapat  $\frac{1}{6}$  dengan syarat:

1. Jika ada satu orang saudara perempuan yang kandung dari simayat
2. Jika tidak ada dua orang saudara perempuan yang langsung dari simayat
3. Jika tidak ada saudara laki-laki seayah dari simayat

(d) Saudara perempuan yang seayah mendapat ashabah bil ghairi dengan syarat :

1. Jika ada saudaranya yang laki-laki
2. Tidak ada saudara laki-laki atau saudara perempuan kandung dari si mayat

(e) Saudara perempuan yang seayah mendapat ashabah ma'al ghairi dengan syarat : jika dia bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan ( anak perempuan dari anak laki-laki ) 11 dan 12 bagian saudara perempuan atau saudara-saudara laki-laki seibu (  $\frac{1}{6}$  atau  $\frac{1}{3}$  ).

Bagian saudara perempuan atau saudara laki-laki seibu ada 2 macam, yaitu :

1. Saudara perempuan atau saudara laki-laki yang seibu mendapat  $\frac{1}{6}$  jika ia seorang, baik laki-laki ataupun perempuan.
2. Saudara perempuan atau saudara laki-laki yang seibu mendapat  $\frac{1}{3}$  jika ia lebih dari seorang, baik laki-laki ataupun perempuan ataupun bercampur laki-laki dengan perempuan. Masing-masing mereka itu mendapat pembagian yang sama dalam yang  $\frac{1}{3}$  itu, yaitu saudara laki-laki seibu tidak dua kali bagian saudara perempuan seibu atau bagian saudara laki-laki seibu tidak berlebih dari bagian saudara perempuan seibu

- *Catatan penting :*

Saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu terhibab oleh ahli waris :

1. Anak laki-laki.
2. Anak laki-laki dari anak laki-laki ( cucu laki-laki)
3. Anak perempuan
4. Anak perempuan dari anak laki-laki ( cucu perempuan)
5. Ayah
6. Ayah dari ayah ( kakek )

### **3. Klasifikasi Bagian Ashabul furudh.**

- a. Ashabul furudh yang mendapat  $\frac{1}{2}$  ada 5 macam, yaitu :

1) Anak perempuan, dengan syarat :

- a) Ia seorang saja.
- b) Tidak ada anak laki-laki

2) Anak perempuan dari anak laki-laki ( cucu perempuan )  
dengan syarat :

- a) Ia seorang saja.
- b) Tidak ada anak laki-laki atau perempuan.
- c) Tidak ada cucu laki-laki ( anak laki-laki dari anak laki-laki )

3) Saudara perempuan yang kandung, dengan syarat :

- a) Ia seorang aja.
- b) Tidak ada saudara laki-laki yang kandung.
- c) Tidak ada anak laki-laki atau perempuan.
- d) Tidak ada cucu ( anak dari anak laki-laki ) laki-laki atau perempuan.
- e) Tidak ada ayah.
- f) Tidak ada ayah dari ayah ( kakek )

4) Saudara perempuan seayah,dengan syarat :

- a) Ia seorang saja.
- b) Tidak ada saudara laki-laki yang seayah
- c) Tidak ada saudara yang kandung laki-laki atau perempuan.
- d) Tidak ada anak laki-laki atau perempuan.

e) Tidak ada cucu ( anak dari anak laki-laki ) laki-laki atau perempuan.

f) Tidak ada ayah.

g) Tidak ada ayah dari ayah ( kakek )

5) Suami, dengan syarat :

Isterinya yang meninggal tidak mempunyai anak atau cucu ( anak dari anak laki-laki) laki-laki atau perempuan, baik anak itu berasal dari suami itu atau tidak.

(1) Ashabul furudh yang mendapat  $\frac{1}{3}$  ada 2 macam, yaitu :

(a) ibu, dengan syarat :

(b) tidak ada anak atau cucu ( anak dari anak laki-laki) laki-laki atau perempuan.

(c) Tidak ada 2 orang saudara atau lebih, lelaki atau perempuan, baik kandung, seayah, atau seibu atau bercampur baur.

(2) Dua orang saudara seibu atau lebih dengan syarat :

(a) Tidak ada anak cucu ( anak dari anak laki-laki ) laki atau perempuan.

(b) Tidak ada ayah.

(c) Tidak ada ayah dari ayah ( kakek ).

b. Ashabul furudh yang mendapat  $\frac{1}{4}$  ada dua macam, yaitu :

1) Suami, dengan syarat :

Isterinya yang meninggal mempunyai anak atau cucu (anak dari anak laki-laki ) laki-laki atau perempuan, baik anak itu berasal dari suami itu ataupun suami yang lain.

- 2) Isteri, baik isteri tersebut seorang atau lebih, dengan syarat : suaminya yang meninggal tidak mempunyai anak atau cucu ( anak dari anak laki-laki ) laki-laki atau perempuan, baik anak itu berasal dari isteri yang itu maupun dari isteri yang lain. Jika isteri itu lebih dari satu orang, mereka berserikat pada bagian yang  $\frac{1}{4}$  tersebut, dengan pembagian yang sama.

c. Ashhabul furudh yang mendapat  $\frac{2}{3}$  ada 4 macam, yaitu :

- 1) Dua orang anak perempuan atau lebih, dengan syarat, Tidak ada anak laki-laki.

- 2) Dua orang atau lebih cucu perempuan ( anak perempuan dari anak laki-laki ) dengan syarat :

- a) Tidak ada anak laki-laki atau perempuan.
- b) Tidak ada cucu laki-laki ( anak laki-laki dari anak laki-laki ).

- 3) Dua orang atau lebih saudara perempuan kandung dengan syarat :

- a) Tidak ada saudara laki-laki kandung.
- b) Tidak ada anak laki-laki atau perempuan.



c) Tidak ada cucu ( anak dari anak laki-laki ) lelaki atau perempuan.

d) Tidak ada ayah.

e) Tidak ada ayah dari ayah ( kakek).

4) Dua orang atau lebih saudara perempuan seayah dengan syarat :

a) Tidak ada saudara laki-laki.

b) Tidak ada saudara kandung, baik laki-laki atau perempuan.

c) Tidak ada anak laki-laki atau perempuan.

d) Tidak ada cucu ( anak dari anak laki-laki ) lelaki atau perempuan.

e) Tidak ada ayah.

f) Tidak ada ayah dari ayah ( kakek ).

d. Ashhabul furudh yang mendapat  $\frac{1}{6}$  ada 7 macam, yaitu :

1) Ibu, dengan syarat :

a) Ada anak atau cucu ( anak dari anak laki-laki ) lelaki atau perempuan.

b) Ada dua orang saudara atau lebih, baik laki-laki ataupun perempuan, baik sekandung, seayah, atau seibu atau bercampur baur.

2) Nenek, seorang atau lebih ( ibu dari ibu atau ibu dari ayah ), dengan syarat : tidak ada ibu, bagi ibu dari ayah disyaratkan tidak ada ayah.

3) Cucu perempuan seorang atau lebih ( anak perempuan dari anak laki-laki), dengan syarat :

- a) Ada anak perempuan seorang saja
- b) Tidak ada cucu laki-laki ( anak laki-laki dari anak laki-laki).

4) Saudara perempuan seayah seorang atau lebih, dengan syarat :

- a) Ada satu orang saudara perempuan yang kandung.
- b) Tidak ada saudara laki-laki kandung.
- c) Tidak ada anak laki-laki atau perempuan.
- d) Tidak ada cucu laki-laki atau perempuan.
- e) Tidak ada ayah.
- f) Tidak ada ayah dari ayah ( kakek )

5) Saudara seibu baik laki-laki atau perempuan, dengan syarat :

- a) Ia seorang saja
- b) Tidak ada anak atau cucu ( anak dari anak laki-laki ) laki-laki atau perempuan.
- c) Tidak ada ayah.
- d) Tidak ada ayah dari ayah ( kakek)

6) Ayah, dengan syarat :

Ada anak atau cucu ( anak dari anak laki-laki ) laki-laki atau perempuan.

7) Kakek, ( ayah dari ayah ) dengan syarat :

a) Tidak ada ayah.

b) Ada anak atau cucu ( anak dari anak laki-laki ) lelaki atau perempuan.

e. Ashhabul furudh yang mendapat  $\frac{1}{8}$  ada 1 macam, yaitu isteri seorang atau lebih dengan syarat, Suaminya yang meninggal mempunyai anak laki-laki atau perempuan, baik anak itu berasal dari isteri tersebut atau dari isteri yang lain. Jika isteri lebih dari satu orang , mereka berserikat pada bagian yang  $\frac{1}{8}$  itu dengan pembagian yang sama.

## **E. Asas-Asas Hukum Waris**

### **1. Pengertian asas**

Perkataan asas berasal dari bahasa arab, asasun. Artinya dasar, basis, pondasi. Jika dihubungkan dengan sistem berfikir, yang dimaksud asas adalah landasan berfikir yang sangat mendasar. Oleh karena itu didalam bahasa Indonesia asas mempunyai arti : pokok, asensi, dasar, pondamen, basis, prinsip.<sup>50</sup> Jika kata asas dihubungkan dengan hukum, yang dimaksud dengan asas adalah kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan

---

<sup>50</sup> M.D.J. Al-Barry,dkk, *Kamus Peristilahan Modern dan Populer*, (Surabaya : Indah, 1996), h.34.

berfikir dan alasan pendapat, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum yang berfungsi sebagai rujukan untuk mengembalikan segala masalah yang berkenaan dengan hukum. Dengan demikian asas hukum Islam adalah berasal dari sumber hukum Islam terutaman al-qur'an dan Hadis yang dikembangkan oleh akal pikiran orang yang memenuhi syarat untuk berijtihad.<sup>51</sup>

Asas-asas fiqh mawaris disebut juga dengan asas-asas Hukum Kewarisan Islam atau yang lazim disebut *faraid* dalam literatur hukum Islam dalah salah satu bagian dari keseluruhan Hukum Islam yang mengatur peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup.

Hukum Kewarisan Islam mengandung berbagai asas yang memperlihatkan bentuk karakteristik tersendiri, disamping mempunyai corak yang berbeda dengan hukum kewarisan lain.

## 2. Macam-macam asas fiqh mawaris

Dalam pembahasan ini dikemukakan lima asas yang berkaitan dengan sifat peralihan harta kepada ahli waris, cara pemilikan harta oleh yang menerima, kadar jumlah harta yang diterima dan waktu terjadinya peralihan harta itu. Asas-asas tersebut yaitu :

### a) Asas ijbari

Dalam hukum Islam peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya

---

<sup>51</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), h.126.

tanpa usaha dari yang meninggal atau kehendak yang akan menerima. Cara peralihan seperti seperti ini disebut secara ijbari.

Kata ijbari secara bahasa mengandung arti paksaan, yaitu melakukan sesuatu diluar kehendak sendiri. Asas ijbari dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah Swt tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya. Unsur paksaan sesuai dengan arti terminologis tersebut terlihat dari segi bahwa ahli waris terpaksa menerima kenyataan perpindahan harta kepada dirinya sesuai dengan yang telah ditentukan. Hal ini berbeda dengan kewarisan menurut hukum perdata (BW) yang peralihan hak kewarisan tergantung kepada kemauan pewaris serta kehendak dan kerelaan ahli waris yang akan menerima. Jadi tidak berlaku dengan sendirinya.

Adanya unsur ijbari dalam sistem kewarisan Islam tidak akan memberatkan orang yang akan menerima waris (ahli waris) , karena menurut ketentuan hukum Islam ahli waris hanya berhak menerima harta yang ditinggalkan dan tidak berkewajiban memikul hutang yang ditinggalkan oleh pewaris. Kewajiban hanya sekedar menolong membayarkan hutang pewaris dengan harta yang ditinggalkannya, dan tidak berkewajiban melunasi hutang tersebut dengan hartanya sendiri. Hal ini berbeda dengan hukum kewarisan menurut hukum perdata, (BW), menurut BW diberikan kemungkinan untuk tidak menerima hak



kewarisan, karena jika menerima akan membawa akibat menanggung risiko untuk melunasi hutang pewaris.<sup>52</sup>

b) Asas bilateral

Asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada ahli warisnya melalui dua arah. Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak garis keturunan perempuan.

Asas bilateral ini dapat secara nyata dilihat dari firman Allah SWT yang telah dikemukakan diatas antara lain dijelaskan dalam QS An-nissa ayat 11 yaitu :

1. Anak perempuan berhak menerima warisan dari kedua orang tuanya sebagaimana yang didapat oleh anak laki-laki dengan bandingan seorang anak laki-laki menerima sebanyak yang didapat dua orang anak perempuan.
2. Ibu berhak menerima warisan dari anaknya baik laki-laki maupun perempuan, begitu pula ayah sebagai ahli waris laki-laki berhak menerima warisan dari anak-anaknya, baik laki-laki, maupun perempuan sebesar seperenam bagian, bila pewaris meninggalkan anak.

Dengan demikian terlihat secara jelas bahwa kewarisan itu beralih kebawah (anak-anak), ke atas (ayah dan ibu ) dan kesamping

---

<sup>52</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : Intermasa, 1977), h.84

(saudara-saudara) dari kedua belah pihak garis keluarga, yaitu laki-laki dan perempuan dan menerima warisan dari dua garis keluarga yaitu garis laki-laki dan garis perempuan. Inilah yang dinamakan kewarisan secara bilateral.

c) Asas individual.

Hukum Islam mengajarkan asas kewarisan secara individual, dengan arti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan. Masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri, tanpa terikat dengan ahli waris yang lain. Keseluruhan harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang mungkin dibagi-bagi, kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menurut kadar bagian masing-masing.

Setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatnya tanpa tergantung dan terikat dengan ahli waris yang lain. Dengan pengertian setiap ahli waris berhak menurut secara sendiri-sendiri harta warisan itu dan berhak pula untuk tidak berbuat demikian.

Dengan memperhatikan bahwa pada suatu sisi setiap ahli waris berhak secara penuh atas harta yang diwarisinya, dan disisi lain terdapat ahli waris yang tidak berhak mengelola hartanya sebelum ia dewasa, maka ahli waris yang telah dewasa dapat saja tidak memberikan harta warisan secara individual kepada ahli waris yang belum dewasa itu. Dalam kasus seperti ini, saudara tertua diantara beberapa orang yang bersaudara (yang belum dewasa) dapat menguasai sendiri harta bersama

untuk sementara. Walaupun demikian sifat individualnya harus tetap diperhatikan dengan mengadakan perhitungan terhadap bagian masing-masing ahli waris, yaitu memelihara harta orang yang belum pantas mengelola hartanya, kemudian mengembalikan harta itu saat yang berhak telah cakap menggunakannya. Tidak ada pihak yang dirugikan dengan cara tersebut. Bila keadaan menghendaki bisa saja warisan tidak dibagi-bagikan. Misalnya seorang suami meninggal dunia dengan meninggalkan seorang isteri dan anak-anak yang masih kecil. Apapun alasannya, dalam keadaan dalam keadaan seperti ini, harta warisan tidak dibagikan demi kemashlahatan para ahli waris itu sendiri. Yang lebih penting tidak dibagi-bagikan warisan itu tidak menghapuskan hak mewarisi para ahli waris yang bersangkutan.<sup>53</sup>

Menghilangkan bentuk individualnya dengan jalan mencampur adukkan harta warisan tanpa perhitungan dan dengan sengaja menjadikan hak kewarisan itu bersifat kolektif berarti menyalahi ketentuan yang disebutkan diatas. Hal tersebut akan mengakibatkan pelakunya terkena sanksi sebagaimana yang disebutkan di akhir Q.S An-nissa ayat 2, yaitu “ dosa yang besar “ .

d) Asas keadilan berimbang

Kata adil merupakan kata bahasa Indoneisia yang berasal dari bahasa Arab al-‘adlu. Hubungannya dengan masalah kewarisan, kata tersebut dapat diartikan keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta

---

<sup>53</sup> Rahmat Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Citra Aditya Bakti, 1999), h.5.

keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaannya. Sebagaimana laki-laki, perempuan pun mendapatkan hak yang sama kuat untuk mendapatkan warisan. Hal ini secara jelas disebutkan dalam QS An-nissa' ayat 7 yang menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hal mendapatkan warisan.

Tentang jumlah bagian yang didapat oleh laki-laki dan perempuan terdapat dua bentuk :

- 1) Laki-laki mendapat jumlah yang sama banyak dengan perempuan seperti ibu dan ayah sama-sama mendapat seperenam dalam keadaan pewaris meninggalkan anak kandung, sebagaimana yang dinyatakan dalam surah An-nisaa ayat 11. Begitu pula saudara laki-laki dan saudara perempuan sama-sama mendapat seperenam dalam kasus pewaris adalah seseorang yang tidak memiliki ahli waris langsung sebagaimana dijelaskan dalam surat An-nisaa' ayat 12 diatas.
- 2) Laki-laki memperoleh bagian lebih banyak atau dua kali lipat dari yang didapat oleh perempuan, yaitu anak laki-laki dengan anak perempuan dijelaskan dalam surat An-nisaa ayat 11, dan saudara laki-laki dengan saudara perempuan dijelaskan dalam surat An-nisaa ayat 176. Dalam QS An-nisaa' ayat 12 dijelaskan bahwa duda mendapat dua kali bagian yang diperoleh oleh janda yaitu setengah banding seperempat bila pewaris tidak ada meninggalkan anak, dan seperempat banding seperdelapan bila pewaris ada meninggalkan anak. Ditinjau dari segi jumlah bagian yang diperoleh saat menerima hak, memang

terdapat ketidaksamaan. Akan tetapi hal tersebut bukan berarti tidak adil, karena keadilan dalam pandangan Islam tidak hanya diukur dengan jumlah yang didapat saat menerima waris, tetapi juga dikaitkan kepada kegunaan dan kebutuhan. Secara umum dapat dikatakan pria membutuhkan lebih banyak materi dibandingkan wanita. Hal tersebut dikarenakan pria dalam ajaran Islam memikul kewajiban ganda yaitu untuk dirinya sendiri dan terhadap keluarganya termasuk para wanita. Sebaliknya wanita menerima warisan adalah untuk dirinya sendiri, karena dia tidak bertanggung jawab untuk memberi nafkah kepada suaminya. Inilah keadilan dalam konsep Islam. Umur juga tidak menjadi faktor yang membedakan hak ahli waris. Dilihat dari segi kebutuhan sesaat yaitu waktu menerima hak, terlihat bahwa kesamaan jumlah penerimaan antara anak kecil yang belum dewasa dengan orang yang telah dewasa tidaklah adil, karena kebutuhan orang dewasa lebih besar dari kebutuhan anak kecil. Tetapi peninjauan tentang kebutuhan bukan hanya bersifat sementara yaitu pada waktu menerima saja, tetapi juga dalam jangka waktu yang lama. Dari tinjauan ini anak kecil mempunyai kebutuhan material yang lebih lama dari pada orang dewasa.

e) Asas semata akibat kematian

Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah kewarisan hanya berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia. Asas ini berarti bahwa harta



seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup. Juga berarti bahwa segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup baik secara langsung, maupun terlaksana setelah dia mati, tidak termasuk kedalam istilah kewarisan menurut Hukum Islam. Dengan demikian fiqh mawaris atau hukum kewarisan Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan yaitu kewarisan akibat kematian semata.

Demikian asas hukum kewarisan Islam yang menunjukkan karakteristik hukum kewarisan Islam. Dengan demikian dapat ditarik perbedaan antara hukum kewarisan Islam dengan sistem kewarisan lain, meskipun terlihat beberapa titik ada kesamaannya. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Bagi umat Islam melaksanakan peraturan-peraturan syari'ah yang ditunjuk oleh nash yang sharih adalah suatu keharusan, antara lain mentaati ketentuan pembagian harta warisan, justru mempelajari ayat-ayat hukum kewarisan merupakan kewajiban agar terhindar dari kesalahan diwaktu pembagian harta warisan.
- 2) Ayat-ayat hukum kewarisan dapat diklarifikasikan kepada,
  - a) Ayat-ayat yang menerangkan pokok-pokok hukum kewarisan
  - b) Ayat-ayat yang menerangkan hukum kewarisan secara global
- 3) Kandungan hukum ayat-ayat pokok hukum kewarisan terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 11, 12, dan 176. Sedangkan yang menerangkan hukum kewarisan secara global terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 7, 8,

9, 10, 13, 14, 19, 33, dan surat Al-Anfal ayat 72-75 serta surat Al-Ahzab ayat 6.

## **F. Sebab-sebab Mendapatkan Warisan dan Tidak Mendapat Warisan**

### **1. Sebab-sebab Mendapatkan Warisan**

Salah satu hal yang terpenting dalam mempelajari hukum waris Islam adalah menyangkut waris, kalau ditinjau dari segi asal kata, perkataan waris berasal dari kata bahasa arab, yaitu *warits*, secara gramatikal berarti yang tinggal atau yang kekal, maka dengan demikian apabila dihubungkan dengan persoalan hukum waris, perkataan waris tersebut berarti orang-orang yang berhak untuk menerima pusaka dari harta yang ditinggalkan oleh si mati, dan populer diistilahkan ahli waris.

Apabila dianalisis ketentuan hukum waris Islam, yang menjadi sebab seseorang itu mendapatkan warisan dari si mayit (ahli waris ) dapat diklasifikasikan sebagai berikut.

#### **a. Karena hubungan perkawinan**

Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) disebabkan adanya hubungan perkawinan antara si mayit dengan seseorang tersebut, yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah suami atau istri dari si mayit.

#### **b. Karena adanya hubungan darah**

Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) disebabkan adanya hubungan nasab atau hubungan darah/kekeluargaan

dengan si mayit, yang termasuk dalam klasifikasi ini seperti ibu, bapak, kakek, nenek, anak, cucu, cicit, saudara, anak saudara, dan lain-lain.

c. Karena memerdekakan si mayit

Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) dari si mayit disebabkan seseorang itu memerdekakan si mayit dari perbudakan, dalam hal ini dapat saja seorang laki-laki atau seorang perempuan.

d. Karena sesama muslim

Seseorang muslim yang meninggal dunia, dan ia tidak meninggalkan ahli waris sama sekali (punah), maka harta warisannya diserahkan kepada Baitul Mal, dan lebih lanjut akan dipergunakan untuk kepentingan kaum muslimin.<sup>54</sup>

## **2. Sebab-sebab Tidak Mendapatkan Warisan**

Adapun yang menjadi sebab seseorang itu tidak mendapat warisan (hilangnya hak kewarisan /penghalang mempusakai) adalah sebagai berikut:

a. Perbudakan

Sejak semula Islam menghendaki agar perbudakan dihapus, namun kenyataannya perbudakan sudah merata dimana-mana dan sukar dihapus. Oleh karena itu, perbudakan mendapatkan tempat dalam pembahasan Hukum Islam. Didalam Al-Qur'an telah

---

<sup>54</sup> Suhrawardi K. Lubis, Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008, ); h.55.

digambarkan bahwa seorang budak tidak cakap mengurus hak milik kebendaan dengan jalan apa saja.

b. Pembunuhan

Para ahli hukum Islam sepakat bahwa tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewarisnya.pada prinsipnya menjadi penghalang baginya untuk mewarisi harta warisan pewaris yang dibunuhnya. Contohnya, seorang anak bungsu yang membunuh orang tuanya engan alasan dendam terhadap sikap pilih kasih yang diterimanya.

c. Berlainan agama

Berlainan agama adalah adanya perbedaan agama yang menjadi kepercayaan antara orang yang mewarisi dengan orang yang mewariskan.

Apabila seorang ahli waris yang berbeda agama beberapa saat sesudah meninggalnya pewaris lalu masuk Islam, sedangkan peninggalan belum dibagi –bagikan maka seorang ahli waris yang baru masuk Islam itu tetap terhalang untuk mewarisi, sebab timbulnya hak mewarisi tersebut adalah sejak adanya kematian orang yang mewariskan, bukan saat kapan dimulainya pembagian harta peninggalan. Padahal pada saat kematian si pewaris, ia masih dalam keadaan nonislam (kafir). Jadi, mereka dalam keadaan berlainan agama.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Fathurrahman, *Ibid.*, h.98.

Andai kata syarat mendapatkan hak mewarisi baru dimulai pada saat pembagian harta peninggalan, tentu terdapat perbedaan hukum tentang mendahulukan dan mengakhirkan pembagian harta peninggalan, dan tentu hak yang demikian itu dapat disalahgunakan oleh ahli waris yang masuk Islam hanya untuk memperoleh harta peninggalan saja dan kemudian murtad kembali setelah tercapai maksudnya.

Contoh: Apabila seorang muslim meninggal dunia, sedang isterinya adalah orang kafir, beberapa jam kemudian istrinya masuk Islam maka si istri tidak berhak menerima warisan walaupun harta warisan belum dibagi.

Demikian juga orang murtad (orang yang meninggalkan/ keluar dari Islam ) mempunyai kedudukan yang sama, yaitu tidak mewarisi harta peninggalan keluarganya. Orang yang murtad tersebut berarti telah melakukan tindak kejahatan terbesar yang telah memutuskan *shilah syariah*. Oleh karena itu para fuqaha telah sepakat bahwa orang yang murtad tidak berhak menerima harta warisan dari kerabatnya.<sup>56</sup>

#### d. Berlainan Negara

Ciri-ciri suatu Negara adalah memiliki kepala negara sendiri, memiliki angkatan bersenjata, dan memiliki keadaulatan

---

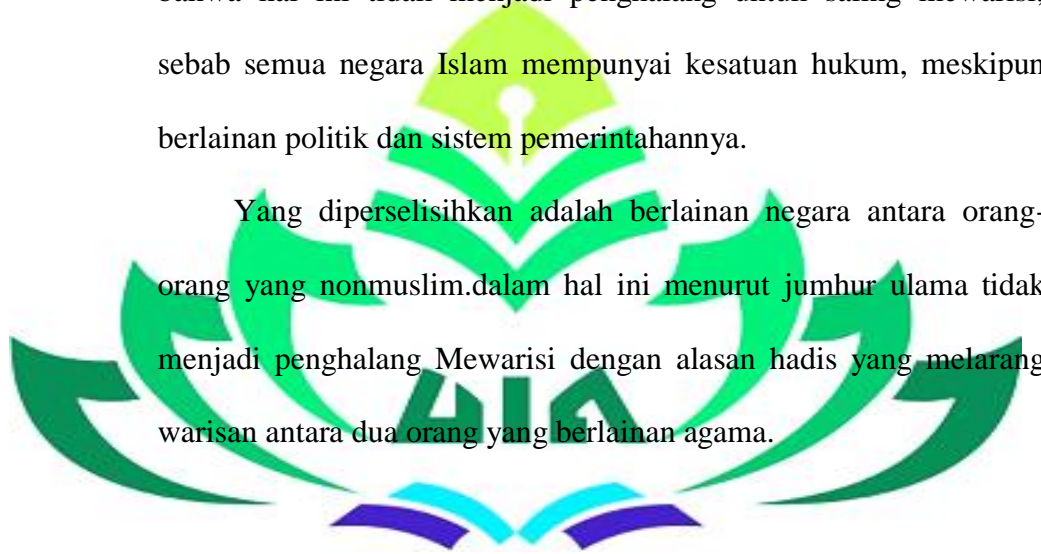
<sup>56</sup> Ibnu Rusyd, *Analisa Fiqih Para Mujtahid (Terjemah Bidayatul Mujtahid) Juz . III*, (Jakarta : Pustaka Imami. 2002),h.497.



sendiri. Maka yang dimaksud berlainan negara adalah yang berlainan ketiga unsur tersebut.

Berlainan negara ada tiga kategori, yaitu berlainan menurut hakikatnya, dan berlainan menurut hakikat sekaligus hukumnya. Berlainan negara antara sesama muslim, telah disepakati *fuqaha* bahwa hal ini tidak menjadi penghalang untuk saling mewarisi, sebab semua negara Islam mempunyai kesatuan hukum, meskipun berlainan politik dan sistem pemerintahannya.

Yang diperselisihkan adalah berlainan negara antara orang-orang yang nonmuslim. dalam hal ini menurut jumhur ulama tidak menjadi penghalang Mewarisi dengan alasan hadis yang melarang warisan antara dua orang yang berlainan agama.



### **BAB III**

## **LAPORAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran umum lokasi penelitian**

Desa Komering Putih berdiri pada tahun 1830 termasuk desa tertua di kecamatan Gunung Sugih, desa Komering Putih mempunyai jumlah penduduk 19.165 jiwa dan luas tanah 7478 km<sup>2</sup>. penduduk di desa Komering Putih sangat heterogen, dimana lebih didominasi oleh penduduk asli Lampung abung nyerupa. Selain itu juga terdapat penduduk pendatang yang bersuku Jawa dan Sunda. Penduduk di desa Komering Putih sebagian besar pekerjaannya adalah petani dan penambang pasir.<sup>57</sup>

Wilayah Komering Putih sebelum tahun 1830, merupakan hutan belantara bagian dari sekala beghak, kemudian datanglah penduduk baru yang berasal dari marga buay nyerupa bumi dan Sumatra Selatan, tetapi sampai sekarang belum diketahui secara pasti kapan penduduk tersebut datang dan membuka hutan belantara tersebut.<sup>58</sup>

Dilihat dari topografinya desa Komering Putih mempunyai tanah yang datar, desa Komering Putih berbatasan dengan :

1. Sebelah utara dengan desa Simpang Agung
2. Sebelah selatan dengan desa Bakari
3. Sebelah barat dengan desa Pajar Bulan
4. Sebelah timur dengan desa Komering Agung

Jenis tanah terdiri dari andosol 55% dan podsolik merah kuning 25% dengan tekstur tanah lempung berpasir, lempung berdebu, dan tanah

---

<sup>57</sup>Dokumentasi, Desa Komering Putih, kec. Gunung Sugih kab. Lampung Tengah.

<sup>58</sup>Dokumentasi, Desa Komering Putih, kec. Gunung Sugih kab. Lampung Tengah.

liat, pemerintah pekon/desa di desa Komering Putih,<sup>59</sup> di provinsi Lampung ada kota Bandar Lampung, dan ada beberapa Kabupaten, salah satunya kabupaten Lampung Tengah. Kabupaten Lampung Tengah memiliki beberapa kecamatan, salah satunya Kecamatan Gunung Sugih, kecamatan Gunung Sugih terdiri dari beberapa desa, salah satunya desa Komering Putih.

## B. Kondisi Demografi Desa Komering Putih Lampung Tengah

Tabel 1  
Monografi Kecamatan Gunung Sugih Tahun 2018/2019

No	Nama Desa	Luas Wilayah	Jumlah Penduduk	
			Kk	Jiwa
1	Purwo sari	1.300	545	1842
2	Purwo sari 2	1.600	3342	1110
3	Telung pedang	2.300	1.134	4519
4	Jaya guna 2	1.290	345	1917
5	Bendo sari pasar	2.789	757	3076
6	Bendo sari	1.679	558	1912
7	Sri agung	1.400	277	1075
8	Simpang rokal	1.700	455	1605
9	Proyek	1.300	378	1425
10	Perumnas	1.30	179	684
	Jumlah	15,359.3	7,970	19,165

Sumber: sub kecamatan dokumentasi Desa Komering Putih

Tabel 2  
jumlah umat beragama di Desa/Kelurahan di Desa Komering Putih,  
Tahun 2017/2018.

<sup>59</sup>Dokumentasi, Desa Komering Putih, kec.Gunung Sugih kab. Lampung Tengah.

desa/kelurahan	Islam	Katolik	Kristen/Protestan	Hindu	Budha
Purwo sari	4.620	0	0	0	0
Purwo sari 2	3.037	0	0	0	0
Telung pedang	1.830	0	0	0	0
Jaya guna 2	1.041	0	0	0	0
Bendo sari pasar	1.455	0	0	0	0
Bendo sari	1.120	0	0	0	0
Sri agung	1.930	0	0	0	0
Simpang rokal	1.367	0	0	0	0
Proyek	686	0	0	0	0
Perumnas	1.645	0	0	0	0

*Sumber: sub bagian umat beragama dokumentasi Desa Komerling Putih.*

100% penduduk Desa Komerling Putih menganut ajaran agama Islam, dari sinilah nilai-nilai sosial dan budaya Islam tersalurkan di masyarakat.

Tabel 3  
Jumlah Sekolah, di desa Komerling Putih, 2017/2018.

No	Jenis Sekolah	Status	Jumlah Sekolah	Gedung Sekolah	Ruang Kelas	Guru	Murid
1	TK	Negeri	1	2	3	3	54
2	TK	Swasta	0	2	4	5	129
3	SD	Negeri	3	6	15	57	215
4	SD	Swasta	0	0	0	0	0
5	SMP	Negei	1	1	12	37	345
6	SMP	Swasta	0	0	0	0	0

7	SMA	Negeri	1	3	15	39	2778
8	SMA	Swasta	0	0	0	0	0
9	SMK	Negeri	0	0	0	0	0
10	SMK	Swasta	0	0	0	0	0

*Sumber: sub bagian sekolah-sekolah dokumentasi Desa Komering Putih*

Tabel 4  
Jumlah Mayoritas Suku di desa Komering Putih, Tahun 2017/2018.

No	Suku	Jumlah
1	Lampung	90%
2	Jawa	10%
3	Sunda	0%
4	Padang	0%
5	Semendo	0%

*Sumber: sub bagian mayoritas suku dokumentasi Desa Komering Putih*

Hampir sebagian besar jumlah suku di Desa Komering Putih, Kecamatan Gunung Sugih adalah Suku Lampung .

### C. Praktik pembagian waris anak perempuan di Desa Komering Putih Lampung Tengah.

Praktik pembagian waris anak perempuan di desa Komering Putih Lampung Tengah, anak perempuan tidak mendapatkan sama sekali harta warisan, hanya anak tertua laki-laki yang akan mendapatkan seluruh harta warisan. Dikarenakan, anak lelaki yang akan menggantikan posisi ayah untuk



bertanggung jawab terhadap keluarganya. Karena masyarakat adat di desa Komering Putih Lampung Tengah mereka termasuk kelompok masyarakat hukum adat geneologis khususnya masyarakat patrilineal, yaitu suatu bentuk masyarakat hukum adat yang menarik garis keturunan dari pihak laki-laki, yang mana seluruh harta warisan jatuh kepada anak tertua laki-laki dan anak perempuan tidak mendapatkan harta warisan.

Anak tertua dalam kedudukannya sebagai penerus tanggung jawab orangtua yang berkewajiban mengurus dan memelihara saudara-saudaranya yang lain, terutama bertanggung jawab atas harta warisan dan kehidupan adik-adiknya yang masih kecil sampai mereka berumah tangga dan berdiri sendiri dalam suatu kekerabatan mereka yang turun temurun.

#### **D. Praktik Pembagian Hak Waris Pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun Di Komering Putih Lampung Tengah**

Masyarakat adat desa Komering Putih Lampung Tengah mereka termasuk kelompok masyarakat hukum adat geneologis khususnya masyarakat patrilineal, yaitu suatu bentuk masyarakat hukum adat yang menarik garis keturunan dari pihak laki-laki, yang mana seluruh harta warisan jatuh kepada anak tertua laki-laki sedangkan anak perempuan tidak mendapatkan harta warisan. Anak tertua laki-laki dalam kedudukannya sebagai penerus tanggung jawab orangtua yang berkewajiban mengurus dan memelihara saudara-saudaranya yang lain, terutama bertanggung jawab atas harta warisan dan kehidupan adik-adiknya yang masih kecil sampai mereka berumah tangga dan berdiri sendiri dalam suatu kekerabatan mereka yang turun-temurun.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak A. Kasim kepala adat dan juga sebagai payung ruwa jurai, di Desa Komering Putih kecamatan Gunung Sugih kabupaten Lampung Tengah, mengapa anak perempuan di Desa Komering Putih tidak mendapatkan harta warisan adalah karena itu semua sudah menjadi hukum kebiasaan yang telah diterapkan secara turun-temurun dari nenek moyang terdahulu pada adat Lampung Pepadun di Desa Komering Putih Lampung Tengah, yang mana seluruh harta warisan akan jatuh kepada anak tertua laki-laki, yang menurut mereka nantinya akan menggantikan posisi ayah atau orang tua di keluarga tersebut.<sup>60</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Marsono sebagai tokoh agama di Desa Komering Putih kecamatan Gunung Sugih Lampung Tengah bahwasannya peraturan yang terdapat dalam adat Lampung Pepadun di Desa Komering Putih Lampung Tengah memanglah menentang hukum Islam, namun kita kembali lagi ke hukum adat bahwa hukum adat adalah hukum yang telah menjadi hukum kebiasaan yang tidak akan bisa dirubah dan akan tetap berlaku.<sup>61</sup> peraturan yang terdapat dalam adat Lampung Pepadun di desa Komering Putih khususnya tentang anak perempuan yang tidak mendapatkan harta warisan dan harta warisan hanya akan di dapatkan oleh anak tertua laki-laki ini tidak tersirat akan tetapi tersurat. Artinya adalah peraturan tersebut tidak tertulis akan tetapi mengikat dan sudah menjadi hukum kebiasaan sehingga sampai saat ini masih dipegang teguh oleh masyarakat adat Lampung Pepadun di Desa Komering Putih Lampung Tengah. Anak laki-laki

---

<sup>60</sup> A. Kasim, wawancara dengan Kepala Adat Desa Komering Putih, Lampung Tengah, 11 Mei 2019.

<sup>61</sup> Marsono, wawancara dengan ustadz Desa Komering Putih, 12 Mei 2019.

mempunyai tanggung jawab dan kewajiban yaitu memelihara, mengurus dan mengembangkan harta orangtua dengan sebaik-baiknya. Membantu saudara-saudaranya, membiayai adik-adiknya hingga mereka mandiri dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. kewajiban-kewajiban tersebutlah yang mengharuskan seluruh harta warisan jatuh kepada anak tertua laki-laki.

Berdasarkan hasil wawancara dengan rohimah masyarakat sekaligus sebagai sample anak perempuan yang ada di desa Komering Putih, tentang tidak ada hak waris anak perempuan pada masyarakat Lampung Pepadun di desa Komering Putih, dia mengatakan itu sudah menjadi hukum kebiasaan di desa ini dan sudah terjadi secara turun-temurun jadi masyarakat di desa Komering Putih hanya mengikuti hukum kebiasaan yang ada di desa tersebut.<sup>62</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rohimmuddin masyarakat yang ada di desa Komering Putih, tentang tidak ada hak waris anak perempuan pada masyarakat Lampung Pepadun di desa Komering Putih, dia mengatakan itu semua sudah menjadi kebiasaan sejak dulu di desa ini, dan sudah menjadi adat istiadat yang tidak bisa dirubah.<sup>63</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan ocha masyarakat yang ada di desa Komering Putih, tentang tidak ada hak waris anak perempuan pada masyarakat Lampung Pepadun di desa Komering Putih, dia mengatakan

---

<sup>62</sup>Rohimah, wawancara dengan masyarakat Desa Komering Putih, 13 Mei 2019.

<sup>63</sup>Rohimmuddin, wawancara dengan masyarakat Desa Komering Putih, 13 Mei 2019.

bahwa mereka hanya mengikuti adat istiadat yang ada sejak nenek moyang terdahulu, dan sejauh ini belum ada yang menentangnya.<sup>64</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan cici masyarakat yang ada di desa Komering Putih, tentang tidak ada hak waris anak perempuan pada masyarakat Lampung Pepadun di desa Komering Putih, dia mengatakan bahwa hal ini sudah menjadi hukum kebiasaan dari nenek moyang yang tidak bisa dirubah.<sup>65</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan zakaria masyarakat yang ada di desa Komering Putih, tentang tidak ada hak waris anak perempuan pada masyarakat Lampung Pepadun di desa Komering Putih, dia mengatakan bahwa dia hanya mengikuti aturan-aturan yang udah menjadi hukum kebiasaan di desa Komering Putih, dan semua itu sudah menjadi hukum kebiasaan yang sangat sulit untuk dirubah.<sup>66</sup>

## **BAB IV ANALISA DATA**

### **A. Faktor-faktor yang mempengaruhi wanita tidak mendapatkan waris di Desa Komering Putih Lampung Tengah**

1. Menurut masyarakat adat Lampung Pepadun di desa Komering Putih anak tertua laki-laki yang akan mendapatkan seluruh harta warisan Dikarenakan

---

<sup>64</sup>Ocha, wawancara dengan masyarakat Desa Komering Putih, 13 Mei 2019.

<sup>65</sup>Cici, wawancara dengan masyarakat Desa Komering Putih, 13 Mei 2019.

<sup>66</sup>Zakaria, wawancara dengan masyarakat Desa Komering Putih, 13 Mei 2019.

anak lelaki yang akan menggantikan posisi ayah untuk bertanggung jawab terhadap keluarganya anak tertua dalam kedudukannya sebagai penerus tanggung jawab orangtua yang berkewajiban mengurus dan memelihara saudara-saudaranya yang lain, terutama bertanggung jawab atas harta warisan dan kehidupan adik-adiknya yang masih kecil sampai mereka berumah tangga dan berdiri sendiri dalam suatu kekerabatan mereka yang turun-temurun.

2. Menurut masyarakat adat Lampung Pepadun di desa Komering Putih bahwa anak perempuan nantinya akan menjadi keluarga oranglain jika sudah menikah dan akan lepas tanggung jawab dari pihak keluarganya atau akan diambil oleh keluarga suaminya jadi mereka berfikir untuk tidak memberi harta warisan kepada anak perempuan mereka dan mereka tidak mau harta warisan yang akan diberikan kepada anak perempuan mereka menjadi milik oranglain.

3. Karena mereka masih menggunakan hukum kebiasaan yang telah diterapkan secara turun-temurun dari nenek moyang terdahulu yang masih dipakai hingga sekarang. Menurut masyarakat komering putih bahwa anak perempuan nantinya akan menjadi keluarga oranglain jika sudah menikah dan akan lepas tanggung jawab dari pihak keluarganya atau akan diambil oleh keluarga suaminya jadi mereka berfikir untuk tidak memberi harta warisan kepada anak perempuan mereka dan mereka tidak mau harta warisan yang akan diberikan kepada anak perempuan mereka menjadi milik oranglain



## **B. Tinjauan Hukum Islam terhadap wanita yang tidak mendapatkan waris di desa Komerling Putih Lampung Tengah**

Pemberian harta warisan dari pewaris kepada anak-anak adalah sebuah kewajiban, kecuali anak angkat yang tidak mendapatkan harta warisan karena anak angkat tidak memiliki haknya kepada harta yang diberikan oleh orang tua angkat, saat orang tua angkat masih hidup.

Dalam Hukum waris Islam, pada prinsipnya pembagiannya bahwa anak laki-laki menerima bagian yang lebih besar daripada anak perempuan. Hal ini merujuk pada pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan sebagai berikut

Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan

Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa harta waris yang diterima oleh anak laki-laki adalah dua kali lipat dari saudaranya. Mungkin bagi orang awam jumlah ini sangatlah merugikan kaum wanita. Jika mengacu kembali pada tujuan dari adanya hukum waris, yaitu keadilan, maka akan mengerti mengapa anak laki-laki mendapatkan bagian yang lebih besar. Keadilan bukan berarti memberi suatu hal yang sama besar, namun memberi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Setiap sistem keturunan yang terdapat dalam masyarakat Indonesia memiliki kekhususan dalam hukum warisnya yang berbeda-beda satu sama lain, yaitu :

Adat Lampung Pepadun didesa Komerling Putih Lampung Tengah mereka termasuk kelompok masyarakat hukum adat geneologis khususnya masyarakat patrilineal. Anak tertua dalam kedudukannya sebagai penerus tanggung jawab orangtua yang berkewajiban mengurus dan memelihara saudara-saudaranya yang lain, terutama bertanggung jawab atas harta warisan dan kehidupan adik-adiknya yang masih kecil sampai mereka berumah tangga dan berdiri sendiri dalam suatu kekerabatan mereka yang turun temurun, adat Lampung Pepadun di desa Komerling Putih juga tidak memberikan sama sekali harta warisan kepada anak perempuan mereka karena menurut mereka anak perempuan akan diambil oleh pihak suaminya dan akan menjadi tanggung jawab suaminya, selain itu juga pembagian warisan seperti ini sudah menjadi hukum kebiasaan yang sudah turun-temurun.

Apabila melihat konteks yang terjadi terhadap hukum waris indonesia selain hukum waris Islam, hukum prularistik, dan masih banyak hukum waris yang berlaku dimasyarakat sistem hukum waris adat dalam pembagian harta warisnya berkaitan erat dengan sistem keturunan. Seperti yang terjadi dalam pembagian harta waris adat Lampung Pepadun merupakan sistem kekeluargaan dimana hak untuk menjadi pewaris jatuh kepada pihak laki-laki ini disebabkan adat Lampung Pepadun garis keturunan dari pihak laki-laki atau yang disebut patrilineal.

Jika ditinjau dari sudut pandang Islam, al-qur'an sebagai pedoman hidup telah menjelaskan bagaimana kedudukan tradisi (adat-istiadat) dalam agama

itu sendiri. Karena nilai-nilai yang termasuk dalam sebuah tradisi dipercaya dapat mengantarkan keberuntungan, kesuksesan, kelimpahan, keberhasilan, bagi masyarakat tersebut. Akan tetapi eksistensi adat-istiadat tersebut juga tidak sedikit menimbulkan polemik jika ditinjau dari kacamata Islam. Tradisi turun laut dengan membawa keberuntungan bagi para nelayan yang baru memiliki perahu agar kelak tidak terjadi malak petaka. Bagaimana Islam memandang keyakinan dan ritual tersebut.<sup>67</sup>

Islam sebagai agama yang syariatnya telah sempurna berfungsi untuk mengatur segenap makhluk hidup yang ada di bumi dan salah satunya manusia setiap aturan-aturan, anjuran perintah tentu saja akan memberi dampak positif dan setiap larangan yang diindahkan membawa keberuntungan bagi hidup manusia. Salah satu larangan yang akan membawa masalah bagi manusia adalah menjauhkan diri dari kebiasaan-kebiasaan nenek moyang terdahulu yang bertentangan dengan ajaran Islam. Hal tersebut sebagai mana yang Allah firman Allah swt dalam al-Qur'an:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَىٰ الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ ءَابَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ (المائدة: 104)

“apabila dikatakan kepada mereka: “marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti rasul”. Mereka menjawab: “cukuplah untuk kami apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya”. Dan apakah mereka itu akan mengikuti nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka

---

<sup>67</sup> Ahmad Sanusi, Sohari, *Ushul Fiqih* ( Jakarta: PT Grafindo Persada, 2015),h.81

itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak (pula mendapat petunjuk”. (QS Al-maidah :104)<sup>68</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang-orang yang lebih patuh pada ajaran dan perintah nenek moyang daripada syariat yang diwahyukan oleh Allah didalam Al-Qur'an. Seperti adanya kepercayaan-kepercayaan tertentu pada ritual-ritual yang menjanjikan keselamatan, ketenangan hidup, penolak balak yang menjadi salahsatu tradisi masyarakat Indonesia diberbagai daerah. Keyakinan Islam sebagai agama universal dan mengatur segala sendi-sendi kehidupan bukan hanya pada hubungan transendental antara hamba dan pencipta tapi juga aspek hidup lainnya seperti ekonomi, sosial, budaya, politik, dan lain sebagainya. Kadang kala pemahaman parsial inilah yang masih diyakini oleh umat Islam. Oleh karena itu, sikap syariat Islam terhadap adat-istiadat senantiasa mendahulukan dalil-dalil dalam Al-Qur'an dan hadis dibanding adat atau tradisi.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا (الأحزاب : 36)

“dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata “. (QS. Al-ahزاب:36)<sup>69</sup>

Merujuk pada kaidah Ushul Fiqih yaitu *urf amm* dan *urf khass* maka apa yang menjadi adat yang dilakukan pada masyarakat adat Lampung Pepadun

<sup>68</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Terjemah dan penafsir Al-qur'an, 1971), h.180

<sup>69</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Terjemah dan penafsir Al-qur'an, 1971), h.673

dalam pembagian harta waris yang melakukan pengalihan diperbolehkan (*mubah*). Selain merujuk kepada *urf* menurut penulis kondisi tersebut sesuai dengan kaidah kelima ushul fiqh yang disebut diartikan sebagai berikut, yaitu sesuatu yang memiliki kesamaan dengan apa yang dianggap benar oleh kalangan ahli agama yang memiliki akal sehat (*ulil al-bab*), dan mereka tidak mengingkarinya.<sup>70</sup> Apa yang telah dilakukan oleh masyarakat Komerling Putih dengan sistem pembagian harta waris yang dilakukan pada seluruh keluarga yang melakukan pengalihan harta waris, sama-sama diterima lapang dada oleh anak perempuan di desa Komerling Putih dan tidak ditemukan adanya sengketa waris dalam pembagian harta waris, meskipun tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam yang semestinya, tidak terjadi kesenjangan antara anak perempuan dan anak laki-laki dan seiring berjalannya waktu hukum kewarisan tersebut dapat bergeser. Karena kebutuhan yang berbeda dan kondisi zaman yang berbeda. Hemat penulis, setiap keluarga berhak menentukan sistem apa yang digunakan dalam pembagian harta warisan selama tidak melanggar syarat dan ketentuan pembagian warisan yang telah penulis jelaskan dalam Bab II halaman 37.

Ada alasan mengapa hukum adat dapat diterima dalam hukum Islam. Sebuah hadist yang mengatakan abdullah Ibn Mas'ud yang dikeluarkan imam Ahmad dalam musanad nya, yaitu :

*“sesungguhnya yang dianggap ummat Islam baik, maka di sisi Allah juga akan dianggap baik”*. Kedua, *“jadilah engkau sebagai Orang yang pemaaf*

---

<sup>70</sup> Mustofa Ahmad Al-Zaqra (Dalam Ahmad Sudirman Abbas), h. 165



*dan suruhlah orang yang melakukan kebaikan (makruf) sebagai penguat untuk menjadikan adat (urf)”.<sup>71</sup>*

Sebagai salah satu dalil hukum (dalam Islam), Islam membagi hukum adat menjadi dua bagian. Pertama *urf sahih*, yaitu hukum adat yang tidak bertentangan dengan al-qur'an dan sunnah (*hadist*), tidak menghalalkan yang haram, dan tidak mengharamkan yang halal. Umpama sesan dalam adat perkawinan di Lampung, tetapi bukan bagian dari mahar melainkan hadiah untuk memuliakan.

Kedua, *urf fasid* (ditolak syara) karena menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Umpama menghalalkan riba atau khamar (*minuman keras*) pada waktu-waktu tertentu. Hukum adat atau *urf sahih* dalam Islam dapat dibagi dua : (1) *urf amm* yakni hukum adat yang berlaku diberbagai tempat, dan (2) *urf khass* yakni hukum adat yang berlaku ditempat tertentu. Baik *amm* ataupun *khass* dapat dijadikan hukum Islam sejauh hanya meliputi muamalah dan tidak bertentangan dengan hukum Islam yang berdasarkan al-qur'an dan sunnah. Bagi imam hanafi, jika *urf amm* bertentangan dengan qiyas, ia akan memilih *urf khass*. Sementara imam maliki menggunakan hukum adat sebagai dalil menetapkan hukum dengan rumus al-maslahah al-mursalah (masalah yang tidak didukung dan tidak pula ditolak oleh nass).<sup>72</sup>

Dengan demikian, dalam menetapkan hukum Islam adat dapat dijadikan latar hukum Islam. Para pelaku penetap hukum Islam (*mujtahid*) harus

---

<sup>71</sup> *Ibid*, h.424

<sup>72</sup> *Ibid*

mempertimbangkan hukum adat dalam menetapkan hukum Islam seperti kesepakatan ahli hukum Islam (fukaha) yang menetapkan rumus dalam ilmu fiqh adalah muhakkamah (hukum adat dapat dijadikan landasan hukum Islam), dan juga rumus lain al-maruf urfan ka al-masyrut syartan ( yang baik itu menjadi kebiasaan, sama halnya dengan yang disyaratkan menjadi syarat).

Pembagian harta waris dalam adat adalah kebiasaan yang berlangsung sejak lama dan turun-temurun yang sampai saat ini masih berlaku, meski demikian pembagian harta waris dalam masyarakat hukum adat Lampung Pepadun di desa Komering Putih tidak menimbulkan mafsadat dan mudarat sehingga hal ini memperkuat pandangan penulis bahwa pembagian harta waris yang hanya diberikan seluruhnya kepada anak tertua laki-laki diperbolehkan (*mubah*) merujuk ushul fiqh atau *urf amm* dan *urf khass* menurut pandangan hukum Islam.

Pembagian harta warisan di adat Lampung Pepadun di desa Komering Putih dalam praktik hukum Islam diperbolehkan berdasarkan ushul fiqh yaitu *urf amm* dan *urf khass* karena sudah menjadi kesepakatan dan musyawarah secara bersama pada keluarga. Secara hukum positif adat masyarakat Lampung Pepadun tidak bertentangan karena tidak melanggar UUD 1945 dan tradisi tersebut masih hidup sesuai dengan pasal 18B (ayat 2) UUD 1945 yang menyatakan negara mengakui serta menghormati kesatuan-keatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip NKRI.

Hal ini dilihat dari segi tujuan berbagai pihak bahwa menurut mereka yang paling berhak mendapatkan warisan itu adalah anak tertua laki-laki karena anak tertua laki-laki mempunyai tanggung jawab atas kelangsungan hidup adik-adiknya dan akan menggantikan posisi ayahnya didalam keluarga, sedangkan anak perempuan akan menjadi tanggung jawab suaminya jika telah menikah.



## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan permasalahan yang telah dibahas dalam bab-bab terdahulu, dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut :

1. Adat Lampung Pepadun di desa Komering Putih Lampung Tengah mereka termasuk kelompok masyarakat hukum adat geneologis khususnya masyarakat patrilineal, yaitu suatu bentuk masyarakat hukum adat yang menarik garis keturunan dari pihak laki-laki, yang mana seluruh harta warisan jatuh kepada anak tertua laki-laki dan anak perempuan tidak mendapatkan harta warisan. Anak tertua dalam kedudukannya sebagai penerus tanggung jawab orangtua yang berkewajiban mengurus dan memelihara saudara-saudaranya yang lain, terutama bertanggung jawab atas harta warisan dan kehidupan adik-adiknya yang masih kecil sampai mereka berumah tangga dan berdiri sendiri dalam suatu kekerabatan mereka yang turun temurun, adat Lampung Pepadun di desa Komering Putih juga tidak memberikan sama sekali harta warisan kepada anak perempuan mereka karena menurut mereka anak perempuan akan diambil oleh pihak suaminya dan akan menjadi tanggung jawab suaminya, selain itu juga pembagian warisan seperti ini sudah menjadi hukum kebiasaan yang sudah turun-temurun . Adat merupakan norma yang tidak tertulis, namun sangat kuat mengikat sehingga anggota-anggota masyarakat yang melanggar adat istiadat akan menderita, karena sanksi keras yang kadang-kadang secara tidak langsung langsung diberikan. Misalnya, pada masyarakat yang

melanggar sistem pembagian harta waris di desa Komering Putih Lampung Tengah akan di pandang sebelah mata oleh Masyarakat.

2. Islam sebagai agama yang syariatnya telah sempurna berfungsi untuk mengatur segenap makhluk hidup yang ada di bumi dan salah satunya manusia setiap aturan-aturan, Salah satu larangan yang akan membawa maslahat bagi manusia adalah menjauhkan diri dari kebiasaan-kebiasaan nenek moyang terdahulu yang bertentangan dengan ajaran Islam. di Indonesia hukum Islam mengenai pembagian harta waris telah dijadikan hukum positif dan pedoman dengan cara yang syar'i. Menurut hukum kewarisan Islam, pembagian harta waris adat Lampung Pepadun di desa Komering Putih Lampung Tengah tidak sesuai dengan syariat Islam karena bertentangan dengan surah 'An-nissa' (4) ayat 11 yang menjelaskan bahwa dimana anak perempuan juga punya hak yang sama dengan laki-laki, yaitu mendapatkan hak waris. namun hukum Islam diturunkan bukanlah untuk memaksa melainkan mengatur umat manusia untuk kemaslahatan. Menurut masyarakat lampung pepadun di desa komering putih lampung tengah pembagian seluruh harta warisan doberikan kepada anak laki-laki tertua membawa kemaslahatan untuk sanak saudara lainnya, dan hal tersebut merupakan adat yang turun-temurun serta sampai saat ini tidak mengakibatkan pertentangan.oleh sebab itu menurut hukum Islam sesuatu yang membawa maslahat diperbolehkan sesuai dengan ketentuan bahwa cara pembagian harta waris sangat dianjurkan dan diwajibkan dalam Islam.



## **B. Rekomendasi**

Setelah melakukan pembahasan dan mengambil beberapa kesimpulan, maka perlu untuk memberi saran-saran yang mungkin bermanfaat bagi semua pihak, saran-saran ini adalah :

1. Kepada tokoh adat, sebaiknya agar adat yang tidak sesuai dengan hukum Islam disesuaikan dengan aturan hukum Islam.
2. Kepada masyarakat adat Lampung Pepadun di desa Komerling Putih Lampung Tengah, agar bisa dan harus melakukan pembagian warisan menurut hukum kewarisan Islam.
3. Kepada tokoh agama, sebaiknya agar dalam pengajian-pengajian di masjid dan khutbah shalat jum'at untuk memberikan arahan kepada masyarakat Komerling Putih untuk membagi harta waris menurut hukum waris Islam.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: akademi presindo, 2010

Ahmad, Cholid Norobuko, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 1997

Al-Husaini Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad, Juz II, *Kifayatul Ahyar*, Bandung Syirkatul Ma'arif. 1983

Ali Mohammad Daud, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007

Ali Zainuddin, *pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010

Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi Ke-4, 2014

Arikunto Suharsimi, *prosedur penelitian, suatu pendekatan praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009

Asy-syafi'I Muhammad bin Idris, *Al-Um*, Juz III, Kairo : Kitab Al-Sya'bi, 1968

Basyir Ahmad Ahzar, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004

Budiono Rahmat, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta : Citra Aditya Bakti, 1999  
Cipta, 2014

Dapertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai pustaka, 1990

Firdaweri, *Fiqh Mawaris*, Fakultas Syari'ah, Bandar Lampung 2008

Hadi Sutrisno, *Metodelogi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi, 1991

Hadi Sutrisno, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991

Hadikusuma Hilman, *Hukum Waris Adat*, Bandung : Alumni, 1983

Hamid Muhammad Muhyidin Abdul, *Panduan Waris Empat Madzhab*, al-kautsar, 2009

Hanafi Ahmad, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta : Bulan 1961.

Hasbi Ash, *Al-quran dan Terjemahannya*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1989.

Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Alqur'an Dan Hadis*, Jakarta : Tintamas, 1982

Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur' aan Dan Hadis*, Jakarta : Tintamas, 2008

Kaelani, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Yogyakarta: padigma, 2008

KartonoMaju Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cetakan ke-7, Bandung: Mandar, 1996

Lubis Suhrawardi K., Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008

M.D.J. Al-Barry,dkk, *Kamus Peristilahan Modern dan Populer*, Surabaya : Indah, 1996

Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004

Muhammad Ali Al-sabouni, *Hukum Kewarisan* ,Jakarta : Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2005

muthiah Aulia, *Hukum Islam Dinamika Perkembangan Seputar Hukum Perkawinan dan Hukum Kewarisan*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017

Rahman Fatchur, Ilmu Waris, Bandung, PT Almarif, 1971

Rusyd Ibnu, *Analisa Fiqih Para Mujtahid (Terjemah Bidayatul Mujtahid)* Juz . III, Jakarta : Pustaka Imami. 2002

Saebani Beni Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Bandung, Pustaka Setia, 1998

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : Intermasa, 1977

Supriyadi, “Pilihan Hukum Kewarisan Dalam Masyarakat Pluralistik (Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata)”, Jurnal Al Adalah, Vol. XII No. 3 Juni 2015, (Kudus: Fakultas Syari’ah STAIN Kudus, 2014)

Syarifuddin Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta : Kencana Pranada Media grup, 2008

Zuhraini, *Serba-Serbi Hukum Adat*, Fakultas Syariah Uin Raden Intan Lampung, 2018

